

65f.092  
FAL

9

**PERSEPSI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)  
PROPINSI JAWA TENGAH TERHADAP FAKTOR-FAKTOR  
YANG MEMPENGARUHI INDEPENDENSI PENAMPILAN  
AKUNTAN PUBLIK**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Memperoleh derajat S-2 Magister Akuntansi**



Diajukan oleh :

Nama : Mikael Kala

NIM : C4C000346

**Kepada  
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA  
MAGISTER AKUNTANSI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2003**

i

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

**PENGESAHAN TESIS**

Tesis Berjudul

**PERSEPSI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)  
PROPINSI JAWA TENGAH TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI INDEPENDENSI PENAMPILAN AKUNTAN PUBLIK**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Mikael Kala  
C4C000346

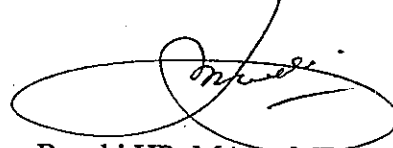
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 18 Juni 2003 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing utama/Ketua



Drs. H. M. Nasir. MSi, Ak.

Pembimbing anggota



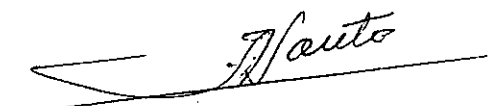
Drs. Basuki HP. MAcc. MBA, Ak.

Penguji



Drs. Sugeng Pamudji, MSi, Ak.

Penguji

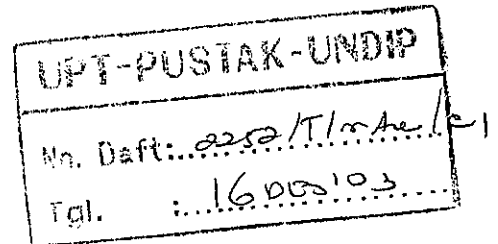


Drs. L. Suryanto, MM.

Penguji

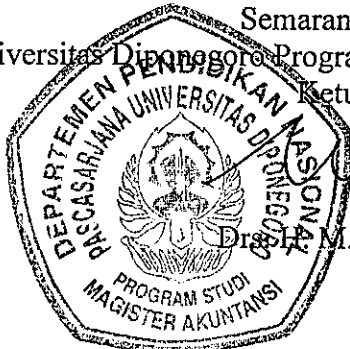


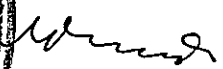
Drs. Didik Ardiyanto, MSi, Ak.



Semarang, 18 Juni 2003

Universitas Diponegoro Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi  
Ketua Program



  
Drs. H. M. Nasir. MSi, Ak.

## ABSTRAKSI

Persepsi BPR terhadap independensi penampilan akuntan publik dipengaruhi oleh persepsi mereka mengenai faktor-faktor yang terdiri dari: (1) tanggungjawab profesional, (2) kecakapan teknik, (3) faktor ekonomi (4) hubungan sosial (5) pemberian jasa lain selain jasa audit (6) penghasilan audit (7) hubungan personal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai persepsi BPR terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah selain memberikan bukti empiris mengenai persepsi BPR atas factor factor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik; juga memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan BPR.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang dikirimkan langsung kepada responden melalui kantor pos; sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) yang dibatasi pada BPR yang terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) propinsi Jawa Tengah tahun 2002 yang berjumlah 587 BPR, dan pernah diaudit oleh akuntan publik. Kepada responden diajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui persepsi mereka mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik. Alternatif jawaban yang disediakan mulai dari "sangat tidak setuju" sampai dengan "sangat setuju" dengan skor "1" sampai dengan "5". Pemilihan BPR sebagai responden dalam penelitian ini atas dasar pemikiran bahwa BPR adalah kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) yang mengenal dengan baik profesi akuntan publik dan berinteraksi secara langsung dengan akuntan publik sebagai pemakai jasanya. Data penelitian yang diperoleh terlebih dahulu diuji kesahihan dan keandalannya sebelum dianalisis. Data yang sah dan andal yang diikutsertakan dalam pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi berganda yaitu uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F).

Hasil analisis data menunjukkan bahwa persepsi BPR mengenai tanggung-jawab professional dan kecakapan teknik berpengaruh positif terhadap independensi penampilan akuntan publik. Faktor hubungan ekonomi berpengaruh negatif terhadap independensi penampilan akuntan publik. Hubungan sosial, pemberian jasa lain selain jasa audit, penghasilan audit, hubungan personal tidak berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik. Secara bersama-sama variabel independen ( $X_1 - X_7$ ) mempengaruhi variabel dependen (Y) sebesar 61,1%. Pengaruh yang disebabkan variabel lain yang tidak diteliti sebesar 39,9%. Penelitian ini perlu direplikasi untuk mendapatkan bukti empiris yang kuat dengan menggunakan variabel lain, jumlah sampel yang lebih besar dan kelompok responden yang berbeda.

## ABSTRACT

BPR perception about the public accountant's independent in appearance influenced by their perception about the factors consists of (1) professional responsibility (2) technical capabilities (3) economic factor (4) the social relationship (5) non audit service providing (6) audit fee (7) personal relationship. The main objective of this research was finding the empirical evidence of The BPR perception about the factors that influence the public accountant's independent in appearance.

The variety of data which is used in this research is prime data and secondary data. Prime data are collected by questionnaire which are directly sent to the respondent through the post office; while the secondary data is taken from the previous research. The journals, theories that are dealing with the research in many kind of auditing and accounting literature. The population of this research was the group of small business. They were only limited to BPR and those registered in Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) Jawa Tengah in 2002 amount 587 BPR, those ever audited by public accountant. The respondents got some questions about the independence of public accountant. The alternatives answer were available from "strongly disagree" up to "strongly agree" with the scores of "1" to "5". The election of BPR for these respondents base on their ability to the public accountant field and the direct interaction to the public accountant as the clients of their profession's service. All collected data have been tested in term of their validity and reliability before they are analyzed. Only valid and reliable data are used in test hypothesis. Double regression consists of  $t_{test}$  and  $F_{test}$  were used in testing hypothesis.

The result of the research shows that BPR perception about professional responsibility and technical capabilities have a positive influence upon the public accountant's independent in appearance. The economic factor has a negative influence upon the public accountant's independent in appearance. The social relationship, non audit service providing, audit fee and personal relationship have not influence upon the public accountant's independent in appearance. All independent variable ( $X_1 - X_7$ ) of the research influence upon dependent variable (Y) 61,1%. Unresearch independent variable influence upon dependent variable 39,9%. This research has to be replicated in finding strong empirical evidence by using other variable and larger group sample and respondents.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Yang Mahakuasa atas kasih dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini. Penulisan tesis merupakan suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program S<sub>2</sub> Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.

Selama mengikuti kegiatan akademik sampai dengan penulisan tesis ini, Tuhan sangat membantu melalui perantaraan banyak pihak; maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. M. Nasir MSi, Akt., selaku Direktur Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro dan sekaligus selaku pembimbing utama penulisan tesis ini yang dengan penuh kesabaran dan keramahan telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga dapat diselesaikan penulisan tesis ini.
2. Bapak Drs. Basuki Hadiprayitno, MBA, Macc, Akt. Selaku pembimbing anggota yang dengan penuh kesabaran dan keramahan telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga dapat diselesaikan penulisan tesis ini.
3. Bapak ibu dosen Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulisan tesis ini.
4. Bapak Luhur Wibowo Hidajat selaku pimpinan dan pemilik PT. Sango Ceramics Indonesia, yang telah memberikan ijin untuk melanjutkan

sekolah pada Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

5. Ayahanda almarhum, Ibunda, Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan dorongan semangat selama belajar sampai selesainya penulisan tesis ini.
6. Istri tecinta Margareta Eka Endang P. yang selalu memberikan dorongan dan inspirasi selama belajar sampai selesainya penulisan tesis ini.
7. Ananda tercinta Benedictus Nugrahanto Kala yang memberikan semangat dan dorongan selama belajar sampai selesainya penulisan tesis ini.
8. Teman-teman kerjaku di PT. Sango Ceramics Indonesia, PT. Inax International Corporation, PT. Flying Wheel Indonesia yang selalu memberikan semangat dan dorongan selama belajar sampai selesainya penulisan tesis ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penulis hanya menyerahkan kepada Yang Mahakuasa yang layak membalasnya. Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dalam peningkatan mutu ilmiah maupun penelitian dimasa mendatang. Semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, Mei 2003

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAKSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
BAB II . TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS .....	12
2.1. Profesi Akuntan Publik di Indonesia .....	12
2.2. Kode Etik Profesi Akuntan Publik .....	15
2.3. Independensi .....	18
2.4. Pengertian Persepsi .....	21
2.5. Persepsi Responden Terhadap Independensi Akuntan publik ....	22

2.6. Pemantauan IAI Terhadap Independensi Anggota.....	34
2.7. Penelitian Terdahulu .....	36
2.8. Kerangka Pemikiran Teoritis .....	40
2.9. Perumusan Hipotesis .....	41
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1. Jenis dan Sumber Data.....	42
3.2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	42
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	43
3.4. Teknik Pengukuran Operasional Variabel .....	44
3.5. Teknik Analisa Data.....	47
3.5.1. Uji Kualitas Data .....	47
3.5.2. Uji Non Responbias.....	48
3.5.3. Uji Asumsi Klasik .....	48
3.5.4. Uji Hipotesis .....	50
<b>BAB IV. ANALISA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
4.1. Analisa Hasil Pengumpulan Data .....	53
4.2. Analisa Pengujian Kualitas Data .....	53
4.2.1. Uji Validitas .....	54
4.2.2. Uji Reliabilitas.....	56
4.3. Pengujian Asumsi Klasik.....	57
4.3.1. Uji Multikolinieritas .....	57
4.3.2. Uji Autokorelasi .....	58
4.3.3. Uji Heteroskedastisitas .....	59

4.3.4. Uji Normalitas .....	59
4.4. Pengujian Hipotesis .....	60
4.4.1. Pengukuran Terhadap Koefisien Regresi (Uji Parsial). 60	
4.4.2. Pengujian Terhadap Pengaruh Variabel Independen secara bersama (Uji Simultan).....	68
4.4.3. Pengujian Terhadap Koefisien Determinasi .....	69
BAB V. PENUTUP .....	71
5.1. Kesimpulan.....	71
5.2. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Operaional Variabel .....	45
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Data.....	54
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas .....	57
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas Data .....	58
Tabel 5. Tabel Analisis Regresi Berganda .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persepsi Responden Terhadap Independensi Akuntan Publik.....	23
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	40
Gambar 3. Grafik Uji Normalitas.....	60

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah.**

Kebutuhan perusahaan besar akan informasi yang dihasilkan oleh jasa profesi akuntan publik, khususnya jasa audit laporan keuangan sudah cukup meluas, dan merupakan suatu keharusan. Kebutuhan akan jasa audit laporan keuangan ini nampaknya masih diabaikan bagi usaha kecil dan menengah (UKM), oleh karena kebanyakan UKM adalah milik perorangan, dan dalam pengelolaan usahanya belum banyak yang menggunakan modal dari pihak luar, baik investor maupun kreditor. Eksistensi UKM semakin diperhatikan pemerintah; oleh karena UKM menempati posisi yang strategis dalam penciptaan dan pemerataan kesempatan kerja bagi penduduk Indonesia, dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara dalam sektor perpajakan.

Pesatnya pertumbuhan dan ketatnya persaingan UKM khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang usahanya menghimpun dana dari masyarakat, dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat luas, sangat dibutuhkan informasi keuangan yang relevan, akurat dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk menilai tingkat keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu BPR, maka dibutuhkan jasa profesi akuntan publik khususnya jasa audit laporan keuangan.

Akuntan publik merupakan suatu profesi yang memberikan jasa pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan perusahaan atau suatu organisasi. Dikatakan sebagai suatu profesi, oleh karena telah memenuhi kriteria yang

disebutkan oleh The Uniform Rules of Professional Conduct (R.J.Anderson , 1984).

Kebutuhan masyarakat akan jasa profesi akuntan publik tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha; baik yang berskala besar maupun yang berskala kecil dan menengah (UKM). Ada dua kelompok masyarakat yang membutuhkan jasa profesi akuntan publik, khususnya jasa audit laporan keuangan yaitu: pihak interen perusahaan dalam hal ini manajemen perusahaan, dan pihak eksteren perusahaan dalam hal ini investor, kreditor, calon investor, calon kreditor dan pemerintah. Manajemen perusahaan membutuhkan jasa audit akuntan publik untuk meyakinkan pihak eksteren perusahaan atas pertanggungjawaban dana masyarakat yang dikelolanya. Pihak eksteren perusahaan membutuhkan jasa audit akuntan publik untuk mendapatkan keyakinan memadai, bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan berisi informasi yang layak dipercaya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bisnis. Berdasarkan kebutuhan masyarakat di atas maka profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat secara umum.

Akuntan publik sebagai suatu profesi kepercayaan didukung oleh pemerintah, dimana akuntan publik dipercayai sebagai auditor melalui kesepakatan antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan pemerintah dengan SK. MENKEU No.763/KMK 011/1986. SK tersebut memberikan kepercayaan kepada akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan jasa yaitu: jasa pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus, pemberian konsultasi, pemberian bantuan dan mewakili dalam bidang yang berhubungan dengan akuntansi. Akuntan publik sebagai pihak

yang dipercaya, dituntut untuk memenuhi standar umum yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi profesinya. Profesi akuntan publik sebagai suatu profesi kepercayaan masyarakat dituntut untuk tidak boleh memihak kepada siapapun (independen), harus bersikap obyektif dan jujur seperti disyaratkan oleh Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA, 1992), dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 1994), standar umum ke 2: "Dalam suatu hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor (IAI, SPAP, 1994: 220)

Independen merupakan aspek yang unik dan vital dari profesi akuntan publik, sebab berhubungan langsung dengan pelaksanaan fungsi akreditasi laporan keuangan. Independen berarti sikap tidak mudah dipengaruhi pihak manapun, tidak memihak kepada kepentingan siapapun, bebas dari kendali dan pengaruh pihak lain, dan bertindak jujur secara obyektif. Untuk bersikap independen, akuntan publik secara intelektual harus senantiasa berpikiran jujur, (Bambang Sudiby, BPFE, 1987). Untuk diakui sebagai seorang yang bersikap independen, ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya, pimpinan perusahaan, pemilik perusahaan, dan tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam hubungan dengan kliennya, pimpinan perusahaan atau pemilik perusahaan.

Arens dan Loebbeck (1989) memberikan pengertian independensi sebagai "suatu pemeriksaan yang tidak bias dalam melakukan tes-tes pemeriksaan, penilaian hasil-hasil dan dalam mengeluarkan laporan pemeriksaan". Sikap tidak memihak ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, yaitu dari sikap mental diri akuntan publik sendiri (independence in fact). Kedua, yaitu dari

persepsi masyarakat terhadap sikap tidak memihak akuntan selama melakukan pemeriksaan (*independence in appearance*). Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998), independensi akuntan publik mempunyai tiga aspek: (1) Independensi dalam kenyataan (*independence in fact*), yang berarti independensi dalam diri auditor yang berupa kejujuran untuk mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemui dalam auditnya; (2) Independensi dalam penampilan (*perceive independence*) atau disebut juga sebagai *independende in appearance* yaitu independensi ditinjau dari sudut pandang pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri auditor; (3) Independensi ditinjau dari sudut keahliannya, yang berarti bahwa auditor dapat mempertimbangkan fakta dengan baik apabila auditor tersebut memiliki keahlian mengenai audit atas fakta tersebut.

Akuntan publik tidak hanya berkewajiban terhadap sikapnya yang obyektif dan tidak memihak, tetapi harus juga menghindari keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat atas sikapnya itu. Tujuan sikap mental independen ini pada dasarnya adalah agar akuntan publik dapat memberikan opini yang obyektif dan jujur atas laporan keuangan klien yang diperiksanya. Opini akuntan publik yang obyektif dan jujur tidak akan menyesatkan semua pemakai informasi laporan keuangan. Adanya kepercayaan masyarakat umum atas sikap independensi profesi akuntan publik sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik sendiri. Akuntan publik harus benar-benar independen, ia juga harus dapat menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat pemakai jasanya bahwa akuntan publik benar-benar independen. Menurut (Mulyadi, 1990) sikap mental independen akuntan publik inilah yang

sulit untuk dipertahankan. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik akan menurun bila sikap independensi akuntan publik menurun.

Dalam prakteknya, masih ada keraguan masyarakat terhadap akuntan publik dalam menjaga dan mempertahankan sikap independensi tersebut. Di Amerika Serikat, kualitas audit dan independensi akuntan publik telah dipertanyakan masyarakat umum, media masa dan pengadilan seperti dimuat dalam *Accounting Horizon*, September 1987, hal.25 oleh John C. dan Larry M Parker. Studi akademik juga telah banyak menyimpulkan tentang keraguan masyarakat terhadap independensi akuntan publik misalnya: Shockley (1981), David Lavin (1976), Michael Firth (1990).

Di Indoensia, isu-isu dan kritikan terhadap eksistensi dan independensi akuntan publik mulai berkembang dalam tahun 1989. Hal ini seiring dengan munculnya pasar modal. Pemberitaan tentang akuntan publik yang turut berperan untuk menentukan lolosnya perusahaan yang akan go-publik dari saringan BAPEPAM jadi ikut terangkat (Irvan Rinaldi,1990,hal.29). Kwik Kian Gie dalam tulisannya menuding cara kerja akuntan publik yang cenderung terlalu berpihak kepada calon emiten. Akuntan publik dikecam karena price earning ratio pada emisi tertentu terlalu tinggi, dan akuntan publik dituduh karena berkelit dari tanggungjawab dengan meminta surat pernyataan klien. Kwik Kian Gie dalam salah satu tulisannya mengemukakan:

“Akuntan publik tidak peduli, apakah dokumen pendukung pembukuan perusahaan, asli atau palsu (aspal). Dengan begitu bagi perusahaan yang merugi, dengan mudah menukangi segala data perusahaannya, dengan memberikan bukti faktur baru yang “aspal” kepada akuntan publik” (Kwik Kian Gie, Kompas, 30 Oktober 1989).

Sorotan yang paling tajam adalah sewaktu profesi akuntan publik Indonesia mendapat kehormatan ditampilkan dalam tajuk rencana Kompas yang merupakan salah satu media masa yang cukup berpengaruh di Indonesia. Masalah yang disorot dalam tajuk rencana tersebut adalah menyangkut kesangsian masyarakat atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Salah satu alinea tajuk rencana dalam harian Kompas, 16 November 1989 mengemukakan:

“.....Dengan kata lain, dalam mengaudit laporan keuangan, akuntan publik diduga lebih menuruti kehendak perusahaan kliennya. Dengan demikian keadaan perusahaan yang digambarkan dalam laporan keuangan bukanlah keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini diakui secara tidak langsung oleh beberapa akuntan publik, yang mengatakan, masyarakat akan menilai mana kantor akuntan publik yang bonafide dan mana yang tidak; mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak.....”

Serentatan pertanyaan juga dikemukakan, antara lain apakah kesangsian masyarakat itu bias dibuktikan sebagai pelanggaran kode etik?. Apa sangsi terhadap akuntan yang nakal?. Beranikah IAI menindak anggotanya dan menghukumnya sehingga masyarakat tahu?. Pada bagian akhirnya mengancam eksistensi akuntan publik, “ada gambaran bahwa mereka bisa dibeli, sementara profesinya adalah memberikan penilaian yang jujur dan independen.

Tulisan dalam tajuk rencana itu menunjukkan kenyataan apa yang sebenarnya terjadi pada profesi akuntan publik Indonesia. Kenyataan itu dipertegas lagi dengan apa yang dikemukakan oleh **Handy Noerjanto**, seorang pengusaha dan klien dari salah satu kantor akuntan publik, dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh IAI dengan Sekolah Tinggi Akuntan Negara (STAN) mengemukakan bahwa “manajemen beranggapan, akuntan publik bekerja untuk

kepentingan mereka". Selanjutnya Handy Noerjanto mengemukakan dalam diskusi panel kerjasama IAI dengan STAN, 27 Mei 1989 di Jakarta sebagai berikut:

.....pengalaman menunjukkan bahwa klien mencari akuntan publik yang bersedia menerima prinsip yang dikehendaki manajemen. Dengan keadaan ini akan merugikan praktek akuntan publik sendiri, karena klien yang mempunyai sikap seperti itu, biasanya akan menuding akuntan publik apabila perusahaannya mengalami krisis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis menduga bahwa masyarakat dunia usaha, khususnya UKM kemungkinan masih meragukan independensi akuntan publik. Kelompok UKM khususnya BPR di propinsi Jawa Tengah mungkin mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap independensi penampilan akuntan publik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian empiris untuk memperoleh masukan yang aktual dan tepat mengenai persepsi BPR terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik sebagai bahan untuk meningkatkan citra profesi akuntan publik di Indonesia.

Persepsi adalah kemampuan untuk memahami sesuatu. Menurut (James P. Chaplin, 1975), persepsi merupakan proses memahami sesuatu atau peristiwa dengan pikiran. Pengertian menurut James P. Chaplin ini, dapat juga berarti :

- Awareness of organic process;
- A group of sensation to which meaning is added from past experience;
- An intervening variable interverred from organism's ability to discriminate among stimuli;
- An intuition awareness of truth or immediate belief about something.

Persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik akan dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan harapan atas jasa yang diberikan akuntan publik tersebut. Setiap kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, akan memberikan persepsi yang berbeda terhadap independensi akuntan publik.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Persepsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Propinsi Jawa Tengah Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik”***.

Obyek persepsi dalam penelitian ini adalah independensi penampilan akuntan publik, dan subyeknya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diwakili oleh para direktur, manajer operasional dan bagian akunting BPR. Subyek penelitian dibatasi pada BPR dan BPR/BKK yang pernah diaudit oleh kantor akuntan publik. Pemilihan subyek ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana persepsi BPR yang pernah diaudit oleh akuntan publik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik.

Beberapa penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik telah dilakukan di Amerika Serikat yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik. Di antara penelitian itu antara lain yang dilakukan oleh Lavin (1976). Lavin meneliti tiga faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik yang meliputi 1) ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien 2) pemberian jasa lain selain jasa

audit 3) lamanya hubungan audit dengan klien. Shockley (1981) meneliti empat faktor yang mempengaruhi independensi Akuntan publik yaitu 1) pemberian jasa konsultansi manajemen kepada klien 2) persaingan antar kantor Akuntan publik 3) ukuran kantor Akuntan publik 4) lamanya hubungan audit. Di Inggris penelitian mengenai independensi akuntan publik telah dilakukan oleh Firth (1986) yang meneliti peranan dan pentingnya auditor independen yang dipersepsikan oleh pihak yang berkepentingan.

Di Indonesia penelitian mengenai independensi akuntan publik telah dilakukan oleh Supriyono (1988). Supriyono mengidentifikasi 6 faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik yang meliputi: 1) ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien 2) persaingan antar kantor akuntan publik 3) pemberian jasa lain selain jasa audit 4) lamanya penugasan audit 5) besarnya kantor akuntan publik dan 6) besarnya fee audit. Nadirsyah (1993), meneliti tentang Persepsi Pemakai Informasi Akuntansi, Akuntan dan Masyarakat Umum terhadap independensi akuntan publik. Suyatmini (2002), meneliti tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik, dengan subyeknya perusahaan go publik di Indonesia.

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu dengan mengemukakan 7 faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik yaitu: 1). tanggungjawab profesional 2). kecakapan teknik 3). faktor ekonomi 4). hubungan sosial 5). pemberian jasa selain jasa audit 6) penghasilan audit 7). hubungan personal. Atribut-atribut tersebut selanjutnya dikembangkan dalam

bentuk pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan kepada responden tentang persepsi mereka terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanggung jawab profesional berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik.
2. Apakah kecakapan teknik auditor berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik.
3. Apakah faktor ekonomi berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik.
4. Apakah hubungan sosial berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik.
5. Apakah pemberian jasa lain selain jasa audit berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik.
6. Apakah penghasilan audit (audit fee) berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik.
7. Apakah hubungan personal berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik.
8. Apakah tanggung jawab profesional, kecakapan teknik auditor, faktor ekonomi, hubungan sosial, pemberian jasa lain selain jasa audit,

penghasilan audit (audit fee), hubungan personal secara bersama-sama berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang persepsi BPR terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai persepsi BPR terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik di propinsi Jawa Tengah.
2. Memberikan informasi dan masukan-masukan kepada pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan BPR, khususnya di propinsi Jawa Tengah baik manajemen, investor, kreditor, maupun masyarakat pemerhati lainnya.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Profesi Akuntan Publik di Indonesia

Akuntan publik adalah suatu profesi kepercayaan masyarakat yang memberikan jasa audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan atau suatu organisasi. Di Indonesia keberadaan profesi akuntan publik secara resmi diakui pemerintah melalui Undang-Undang No.34 tahun 1954. Sebagai suatu organisasi profesi yang memberikan jasa audit kepada masyarakat umum, maka profesi akuntan publik harus memenuhi beberapa persyaratan supaya dapat disebut sebagai profesi.

Menurut Hadibroto dalam disertasinya (1982:5) menjelaskan pengertian profesi sebagai kumpulan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas serupa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1). Bahwa harus berdasarkan suatu disiplin pengetahuan khusus.
- 2). Diperlukan proses pendidikan tertentu untuk memperoleh pengetahuan ini.
- 3). Bahwa harus ada standar-standar kualifikasi yang mengatur jika mau memasukinya dan harus ada pengakuan formal mengenai statusnya.
- 4). Bahwa harus ada norma perilaku yang mengatur hubungan antara profesi dengan klien, teman sejawat dan publik maupun penerimaan tanggung jawab yang tercakup dalam suatu pekerjaan yang melayani kepentingan umum.
- 5). Bahwa harus ada suatu organisasi yang mengabdikan diri untuk memajukan kewajiban-kewajibannya terhadap masyarakat di samping

untuk kepentingan-kepentingan kelompok.

Menurut Roy dan Mc Neill (1990:66), ciri-ciri dari suatu profesi yang telah mapan adalah sebagai berikut:

- 1). Memberikan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat.
- 2). Terikat oleh prinsip-prinsip etik dengan tekanannya pada kebajikan berupa pelayanan, kejujuran, integritas, serta pengabdian kepada kesejahteraan yang dilayani.
- 3). Mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota, yang diatur dengan Undang-Undang.
- 4). Mempunyai prosedur dalam menegakkan disiplin anggota, yang melanggar kode-etik.
- 5). Mempunyai pengetahuan minimal dalam bidang keahliannya yang diperoleh melalui pendidikan formal.
- 6). Mempunyai bahasa sendiri, dan mengenal hal-hal yang sangat teknis hanya dimengerti oleh mereka yang menjadi anggota.

Karakteristik-karakteristik di atas dapat disimpulkan bahwa akuntan publik adalah suatu profesi, dengan alasan:

- 1). Memiliki keahlian dan pendidikan khusus.

Untuk mendapatkan kualifikasi sebagai seorang akuntan, harus melalui proses pendidikan formal. Di Indonesia seseorang disebut akuntan apabila dia telah lulus pendidikan program sarjana (S1) pada fakultas ekonomi jurusan akuntansi universitas negeri dan memiliki register negara, atau mereka yang telah lulus ujian negara akuntansi (UNA) profesi,

sebagaimana disyaratkan UU No.34 tahun 1954.

2). Memenuhi persyaratan tertentu untuk memasuki profesi tersebut dan diatur oleh Undang-Undang. Di Indonesia persyaratan untuk menjalankan praktek akuntan publik telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 763/WK.001/1986 tentang akuntan publik.

3). Memiliki kode etik.

Supaya akuntan publik dapat diterima di masyarakat baik secara individu maupun kelompok, maka perlu etika profesi yang mengatur moral para akuntan publik. IAI telah menyusun kode etik profesi dan telah beberapa kali disempurnakan.

4). Kepentingan masyarakat.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, akuntan publik mengutamakan kepentingan masyarakat, karena akuntan publik merupakan kepercayaan masyarakat. Untuk diakui statusnya sebagai profesi, maka ia mempunyai batas dasar kemampuan profesinya untuk merumuskan secara bebas dari pengaruh manapun. Tetapi dalam memutuskannya ia tunduk pada norma-norma profesi yang ada.

5). Memiliki organisasi profesi.

Untuk diakui sebagai profesi, akuntan publik Indonesia telah membentuk organisasi profesi yaitu IAI, yang telah didirikan sejak tahun 1957. Fungsi organisasi tersebut adalah sebagai pusat operasi dalam perumusan perbaikan, termasuk memperbaiki spesialisasi pengetahuan, tanggung jawab kepada masyarakat, kode etik. dan lain sebagainya.

## **2.2. Kode Etik Profesi Akuntan Publik.**

Kode etik profesi merupakan suatu prinsip moral dalam melaksanakan aturan-aturan yang menjadi pedoman untuk berhubungan dengan klien, masyarakat, anggota sesama profesi serta pihak yang berkepentingan lainnya. Kode etik dapat berupa aturan umum mengenai tingkah laku yang baik atau aturan-aturan khusus yang tidak boleh dilakukan.

Masyarakat percaya bahwa pekerjaan akuntan publik dilaksanakan secara profesional, maka profesi akuntan publik harus selalu mempertahankan dan meningkatkan mutu jasa auditnya. Kode etik profesi dapat membantu para akuntan publik untuk mencapai mutu audit pada tingkat yang diharapkan. Akuntan publik yang dapat dipercayai oleh masyarakat harus memiliki prinsip-prinsip etik sebagai berikut:

1). **Independensi, integritas dan obyektivitas.**

Akuntan publik harus menjaga kejujuran dan obyektivitas ketika melakukan pemeriksaan serta harus independen terhadap klien yang diperiksanya.

2). **Kompetensi dan standar teknis.**

Akuntan publik harus menjalankan standar teknis profesi dan berusaha untuk senantiasa meningkatkan keahlian kecakapan serta kualitas pelayanannya.

3). **Bertanggungjawab kepada klien.**

Akuntan publik harus jujur dan terus terang kepada kliennya serta

memberikan pelayanan profesi kepada mereka semaksimal mungkin sesuai dengan kepentingan mereka, konsisten dengan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

4). Bertanggungjawab kepada kolega.

Akuntan publik harus berperilaku sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan hubungan baik diantara sesama anggota profesi.

5). Bertanggung jawab kepada praktek lainnya.

Akuntan publik harus menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab sehingga akan mempertinggi martabat profesi dan kemampuannya dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

Sutojo (1991:7) mengemukakan lima prinsip dasar dalam kode etik profesi yang harus dipegang teguh oleh akuntan publik. Prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Independen artinya membebaskan diri dari semua kepentingan yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan integritasnya, serta juga tampak oleh semua pihak integritas dalam arti terus terang, jujur dan bersungguh-sungguh.
- 2) Obyektif yaitu tidak memihak, tidak bias dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga adil bagi semua pihak.
- 3). Akuntan publik membebaskan diri dari kepentingan yang dapat menimbulkan dugaan bahwa akuntan publik sudah tidak independen.
- 4). Dapat memegang rahasia. Semua informasi yang diperoleh mengenai

kliennya dirahasiakan dan tidak digunakan untuk maksud apapun kecuali atas ijin klien, atas kehendak hukum atau atas kehendak ikatan profesi.

- 5). Kompeten, dalam hal manapun mematuhi standar teknis profesi dan terus menjaga tingkat kemampuannya selama karier profesinya.

Kode etik akuntan Indonesia tahun 1990 terdiri dari 8 bab dan 11 pasal, telah memuat prinsip-prinsip dasar etik seperti yang dikemukakan sebelumnya. Dengan demikian diharapkan dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa akuntan publik Indonesia bekerja melindungi kepentingan masyarakat. Pasal-pasal yang memuat prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Integritas dan obyektivitas dimuat dalam ayat 2 pasal 1. Integritas dan obyektivitas akuntan publik memudahkan bagi masyarakat untuk mempercayainya, karena apabila pendapat dan kesimpulan yang dibuat akuntan publik bersifat obyektif maka masyarakat merasa diperlakukan secara adil.
- 2). Independensi dimuat dalam ayat 1 pasal 6 yaitu pasal yang khusus mengatur kode etik tambahan untuk akuntan publik. Independensi mendukung keyakinan masyarakat mengenai integritas dan obyektivitas akuntan publik. Makin independen akuntan publik, maka akan makin kecil kemungkinannya dipengaruhi obyektivitasnya.
- 3). Dapat memegang rahasia klien dimuat dalam pasal 4. Akuntan publik dituntut untuk dapat merealisasikan dan menekan keinginannya untuk menceritakan informasi mengenai klien kepada orang lain.

- 4). Kompetensi diatur dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal 2, pasal 3, pasal 5 dan ayat 2 pasal 6. Akuntan publik harus kompeten di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

### **2.3. Independensi.**

Independensi adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh profesi akuntan publik. Menurut John L. Carey (1982), istilah “independen auditor” digunakan dalam pengertian “independen contractor”. Selanjutnya akibat perkembangan profesi akuntan publik dengan karakteristik integritas dan obyektivitasnya, maka istilah independensi selalu dihubungkan dengan profesi akuntan publik.

Dalam kamus “A Dictionary for Accountants, 1975” independensi diartikan sebagai: “suatu hubungan antara akuntan dengan kliennya, atau dengan atasan kliennya yang bersifat sedemikian rupa, sehingga temuan dan laporan yang diberikan akuntan publik hanya dipengaruhi oleh bukti-bukti yang ditemukan dan dikumpulkan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip profesionalnya”. Sedangkan Raph Estes (1988) mengartikan independensi sebagai “suatu kondisi keterbukaan (open minded), netral dan tidak bias, terhadap pihak lain”. Arthur (1978) dalam artikel Antle (1984) mengatakan bahwa independensi profesional adalah suatu konsep fundamental bagi profesi akuntan publik.

Independensi secara esensial merupakan sikap pikiran yang dicirikan oleh pendekatan integritas dan obyektivitas tugas profesional. Hal ini senada dengan American Institute of Certified Public Accountant (AICPA, 1989) professional standards yang menyatakan bahwa “independensi adalah suatu kemampuan untuk

bertindak berdasarkan integritas dan obyektivitas". Meskipun integritas dan obyektivitas tidak dapat diukur secara pasti, tetapi keduanya merupakan hal yang mendasar bagi profesi akuntan publik. Integritas merupakan prinsip moral yang tidak memihak, jujur, memandang dan mengemukakan fakta seperti apa adanya. Sedangkan obyektivitas merupakan sikap tidak memihak dalam mempertimbangkan fakta yang dihadapi. Mulyadi (1990: 20) menyatakan bahwa independensi adalah sikap kejujuran dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta, dan adanya pertimbangan yang obyektif dan tidak memihak dalam diri akuntan dalam merumuskan dan menyatakan pendapat

Kode etik akuntan tahun 1994 disebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya yang bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Setiap akuntan harus memelihara integritas dan obyektivitas dalam tugas profesionalnya dan seorang auditor harus independen dari semua kepentingan yang bertentangan atau pengaruh yang tidak layak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan sikap seseorang untuk bertindak secara obyektif dan integritas yang tinggi. Integritas berhubungan dengan kejujuran intelektual akuntan. Sedangkan obyektivitas secara konsisten berhubungan dengan sikap mental netral dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan menyiapkan laporan audit. Independensi akuntan publik mencakup dua aspek pengertian yaitu: pertama, independensi dalam kenyataan atau *in fact*; kedua, independensi dalam penampilan atau *independence In appearance*. Independensi dalam kenyataan atau *in fact* artinya:

independensi dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang dijumpai dalam pemeriksaan, dilakukan dengan jujur dan obyektif. Independensi dalam penampilan atau *independence In appearance* artinya: independensi dipandang dari sudut pandang pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri akuntan (Kell, Walter G. William C. Boynton, 1992: 51).

Mulyadi (1990: 49) menyatakan independensi auditor mempunyai tiga aspek yaitu: (1) independensi dalam diri auditor yang berupa kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemui dalam auditnya, aspek independensi ini disebut dengan istilah independensi dalam kenyataan atau *independence in fact*, (2) Independensi ditinjau dari sudut pandang pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri auditor; aspek independensi ini disebut dengan istilah independensi dalam penampilan atau *perceived independence* atau *Independence in appearance*, (3) Independensi dipandang dari sudut keahliannya. Seseorang dapat mempertimbangkan fakta dengan baik jika ia mempunyai keahlian audit atas fakta tersebut. Seorang akuntan publik yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai komputer, tidak akan dapat mempertimbangkan dengan obyektif informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan yang diolah dengan menggunakan komputer. Akuntan publik tidak memiliki independensi bukan karena tidak adanya kejujuran dalam dirinya, melainkan karena tidak adanya keahlian mengenai obyek yang diperiksanya. Kompetensi akuntan publik menentukan independen tidaknya akuntan tersebut di dalam mempertimbangkan fakta yang diperiksanya. Dalam penelitian ini penekanannya pada independensi dalam penampilan atau

independence in *appearance* yaitu independensi ditinjau dan sudut pandang pihak lain yaitu BPR di propinsi Jawa Tengah yang pernah menggunakan jasa audit akuntan publik.

Penilaian masyarakat terhadap independensi akuntan publik umumnya tidak secara perseorangan namun secara keseluruhan terhadap organisasi profesi akuntan publik. Dengan demikian jika seseorang akuntan publik atau suatu kantor akuntan publik gagal dalam mempertahankan sikap independensinya, maka kemungkinan besar masyarakat beranggapan bahwa seluruh akuntan publik tidak independen. Kecurigaan tersebut dapat berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik khususnya dalam perberian jasa audit laporan keuangan.

#### **2.4. Pengertian Persepsi**

Persepsi adalah bagaimana individu melihat atau menafsirkan kejadian-kejadian atau obyek-obyek. Setiap manusia akan bertindak berdasarkan persepsinya tanpa memperhatikan, apakah persepsi itu mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Proses persepsi diawali dengan panca inderanya, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. Proses tersebut kemudian diteruskan ke pusat susunan syaraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis, sehingga individu menyadari apa yang diinderainya, individu kemudian mengalami persepsi.

Proses penginderaan selalu terjadi setiap saat melalui reseptornya. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Stimulus yang diindera itu oleh individu diseleksi, diorganisasikan, kemudian

diinterpretasikan, sehingga individu menyadari, mengerti apa yang diindera itu; proses inilah yang disebut persepsi.

Menurut Gary Siegel dan Helena Ramana uskas-Marconi (1989) persepsi diartikan sebagai proses di mana individu menyeleksi, mengorganisir, dan menginter-pretasikan rangsangan (stimuli) ke dalam suatu gambaran yang berarti dan koheren dengan dunia. Defenisi yang sama dikemukakan juga oleh ahli psikologi Karen Hufman, Mark vernoy dan Barbara Williams (1987) sebagai proses penyeleksian, pengorganisasian dan penyampaian data informasi kedalam suatu gambaran dunia yang dapat digunakan oleh mental.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian arti kepada stimulus yang dipergunakan oleh seseorang atau individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya, dengan jalan menyeleksi dan mengorganisir masukan-masukan yang diterimanya melalui panca indera.

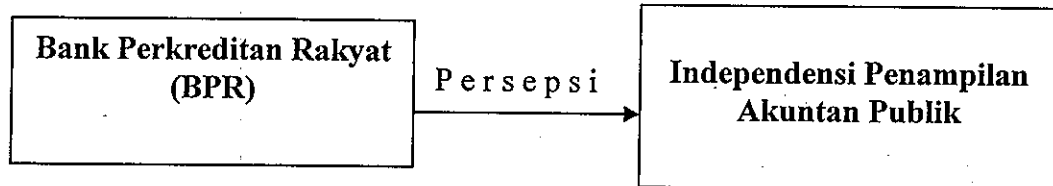
## **2.5. Persepsi Responden Terhadap Independensi Akuntan Publik.**

Persepsi responden tentang independensi akuntan publik dipengaruhi oleh independensi penampilan akuntan publik. Apabila independensi penampilan akuntan publik yang dipandang responden tidak sesuai dengan harapannya, maka mereka akan mempersepsikan akuntan publik tidak independen lagi. Menurut Supriyono (1988) kecurigaan masyarakat terhadap independensi akuntan publik dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik, khususnya dalam pemberian jasa audit akuntan. Setiap perilaku akuntan publik sangat menentukan persepsi responden. Persepsi BPR terhadap obyek

stimulus yaitu independensi akuntan publik dapat digambarkan sebagai berikut :

**GAMBAR 1**

**PERSEPSI BPR TERHADAP INDEPENDENSI  
PENAMPILAN AKUNTAN PUBLIK**



Akuntan publik harus memelihara sikap independensinya, baik independensi in fact, maupun independensi in appearance; supaya BPR tidak mempunyai persepsi negatif terhadap independensi akuntan publik. Determinan independensi yang dapat mengukur independensi penampilan akuntan publik dan akan mempengaruhi setiap persepsi responden BPR adalah sebagai berikut:

**1). Tanggung jawab profesional.**

Akuntan publik dalam memberikan pelayanan jasa profesionalnya, bertanggung jawab kepada kepentingan masyarakat luas (publik servant attitude), bukan melayani kepentingan tertentu saja (kliennya). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lavin (1976) Shockley (1981) dan Knapp (1985) mengakui peranan akuntan publik sebagai bagian dari sistem informasi masyarakat. Tanggung jawab profesional dimasukkan sebagai determinan independensi dalam penelitian ini supaya masyarakat tidak disesatkan oleh laporan audit akuntan. Menurut Holmes dan Burns "tanggung jawab etis seorang akuntan publik kepada masyarakat harus sedemikian rupa, sehingga masyarakat yang berkepentingan

dengan dunia usaha tidak disesatkan dengan laporan pemeriksaan akuntan terhadap kondisi perusahaan. Seorang akuntan publik yang tidak menunjukkan tanggung jawab moral terhadap masyarakat akan kehilangan integritas dan nama baiknya. Akuntan publik bertanggung jawab kepada masyarakat, juga mempunyai tanggung jawab hukum sebagai konsekuensi profesinya.

Akuntan publik dalam melaksanakan tugas profesionalnya, tidak boleh memberikan informasi keuangan klien yang diperiksanya kepada pihak lain yang bias memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan. Konsekuensi perbuatan itu akan melanggar tanggung jawab etis terhadap masyarakat, klien dan juga melanggar hukum.

## **2). Kecakapan Teknik.**

Kecakapan (competence) dalam praktek akuntan publik menyangkut masalah kualitas teknis dari anggota dan stafnya, kemampuan untuk mengawasi dan menilai mutu tugas yang telah dilaksanakan. Kecakapan teknik berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan mempergunakan pertimbangan yang independen dalam usaha menerapkan keahlian pada setiap tugasnya secara saksama. Rittenberg (1976) mengemukakan bahwa kemampuan untuk mencapai pertimbangan yang independen sangat tergantung pada kecakapan teknik akuntan publik. Berdasarkan pendapat di atas, maka kecakapan auditing dan kecakapan akuntansi dimasukkan sebagai determinan independensi akuntan publik.

Profesi akuntan publik berhubungan erat dengan kemampuan untuk bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan pemeriksaan akuntan. Akuntan publik mencapai keahlian tersebut melalui pendidikan resmi, kemudian

dikembangkan melalui pengalaman praktek pemeriksaan akuntan. Kecakapan teknik di bidang akuntansi dan auditing merupakan syarat mutlak bagi akuntan publik dalam menjalankan tugas profesionalnya.

### 3). Faktor Ekonomi.

Akuntan publik harus bebas dari ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien yang diaudit; jika tidak akan mengakibatkan rusaknya independensi akuntan publik. *Code of Profesionai Ethics* (Rule 101 - Independence) menjelaskan bahwa: kantor akuntan publik yang bertindak sebagai partner usaha dengan suatu perusahaan atau sebagai pemegang saham, tidak boleh memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan tersebut, kecuali Ia atau kantornya independen dalam hubungannya dengan perusahaan tersebut. (Carmichael dan Willingham,1987: 42).

Rule tersebut menyatakan bahwa independensi akuntan publik dianggap lemah apabila :

- A). Selama periode perjanjian kerja atau saat menyatakan pendapatnya, dia atau kantornya.
  - (1a). Memiliki atau telah sanggup memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material di dalam perusahaan yang diperiksanya, atau
  - (1b). Sebagai *trustee*, atau eksekutor, atau administrator satu atau beberapa "*estate*" yang memiliki atau telah sanggup memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material di dalam perusahaan yang diperiksanya atau

- (2). Memiliki investasi bersama di dalam bisnis dengan perusahaan yang diperiksanya atau dengan karyawan penting, direktur atau pemegang saham utama perusahaan yang diperiksanya, yang jumlahnya material dalam hubungannya dengan kekayaan bersih kantornya; atau
  - (3). Memiliki hutang atau piutang pada perusahaan yang diperiksanya, karyawan penting atau pemegang saham utama. Hutang dan piutang ini mencakup hutang atau piutang akuntan pemeriksa atau kantor akuntannya kepada lembaga keuangan yang diperiksanya jika utang atau piutang tersebut melalui prosedur, jangka waktu dan syarat-syarat yang normal (a) hutang yang diperoleh akuntan atau kantor akuntannya yang tidak material dihubungkan dengan kekayaan bersih peminjam, (b) hipotek rumah, (c) hutang lain yang dijamin, kecuali hutang yang dijamin oleh kantor akuntan pemeriksa yang tidak cukup jaminannya.
- B). Dalam periode laporan keuangan, periode kontrak kerja pemeriksaan atau saat menyatakan pendapat, dia atau kantor akuntannya:
- (1). Bertindak sebagai promotor, penjamin emisi surat berharga, direktur atau karyawan penting atau dalam kedudukan setara dengan anggota manajemen atau karyawan penting perusahaan yang diperiksa; atau

- (2). Trustee dana pensiun atau *'profit sharing trust'* perusahaan yang diperiksanya.

AICPA (1989) mengeluarkan 8 (delapan) butir interpretasi mengenai rule 101 – independensi untuk memperjelas rule independensi tersebut. Salah satu interpretasinya adalah penerapan Rule 101 terhadap personal profesional yang diatur dalam rule 101.7 dinyatakan sebagai berikut: istilah "ia atau kantor akuntannya" seperti yang digunakan dalam kalimat pertama Rule 101 berarti:

- (1). Seluruh partner atau pemegang saham dalam kantor akuntan yang bersangkutan.
- (2). Seluruh karyawan profesional baik yang tetap maupun yang tidak tetap, ikut serta dalam perjanjian atau berkedudukan dalam suatu kantor yang ikut dalam suatu perjanjian kerja.

Lavin (1976) meneliti beberapa faktor ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien seperti dikemukakan oleh AICPA (1989) yang meliputi:

- (1). Akuntan publik menempati atau mengelola bangunan yang dimiliki oleh klien.
- (2). Akuntan publik menyewa komputer milik klien.
- (3). Hubungan famili pemeriksa dengan pimpinan perusahaan yang diperiksanya.

#### **4). Hubungan Sosial**

Hubungan sosial yang dimaksud adalah dimana akuntan publik menjadi anggota atau pengurus pada badan-badan sosial. AICPA (1989) melalui interpretasi Rule 101.1 tentang jabatan direktur dan dewan kehormatan dijelaskan

bahwa anggota profesi akuntan publik sering diminta untuk meminjamkan prestis namanya direktur atau anggota dewan kehormatan untuk organisasi-organisasi non laba yang batas aktivitasnya sebagai lembaga amal, keagamaan, kemasyarakatan atau sejenis dengan itu. Seorang anggota yang mengizinkan namanya untuk maksud tersebut diatas, dan berhubungan dengan laporan keuangan organisasi tersebut, tidak kehilangan independensinya menurut Rule 101 sepanjang:

- (1). Posisinya benar-benar dewan kehormatan.
- (2). Posisi tersebut diidentifikasi kehormatan di dalam semua kepala surat dan surat edaran keluar yang mana Ia disebutkan sebagai direktur atau dewan kehormatan.
- (3). Dia membatasi partisipasinya hanya kepada pemakai namanya.
- (4). Dia tidak memberikan suaranya atau dengan kata lain berperan serta dalam fungsi manajemen.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, apabila seorang akuntan publik menjadi anggota pengurus pada suatu yayasan sosial, maka ia tidak dapat memeriksa yayasan tersebut karena independensinya diragukan.

##### **5). Pemberian Jasa Lain Selain Jasa Audit**

Perkembangan dan kompleksnya aktifitas perusahaan mendorong manajemen perusahaan membutuhkan jasa lain selain jasa audit. Klien yang diaudit sering meminta kantor akuntan publik yang melaksanakan audit untuk memberikan jasa lain selain jasa audit. (Supriyono 1988:42). Permintaan jasa lain timbul karena manajemen memandang bahwa dari pelaksanaan audit tersebut, akuntan publik dapat mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi

manajemen, dan diharapkan berbagai permasalahan tersebut dapat segera diatasi.

Sebaliknya dapat terjadi bahwa, kantor akuntan publik semula hanya memberikan jasa lain selain jasa audit pada kliennya; karena hubungan yang sudah terjalin tersebut kemudian kantor akuntan diminta untuk mengaudit kliennya. Jasa lain selain jasa audit laporan keuangan adalah:

- Konsultasi manajemen
- Penyusunan sistem akuntansi
- Pendidikan dan latihan
- Studi kelayakan
- Pemeriksaan khusus
- Jasa non. audit untuk memperlancar usaha klien untuk *go public*.

Banyak jasa akuntan publik yang dapat diberikan kepada kliennya selain jasa tersebut di atas. Pemberian jasa non audit ini dapat mengakibatkan akuntan publik kehilangan independensinya.

#### **6). Penghasilan Audit (audit fee)**

Profesi akuntan publik memiliki ciri yang berbeda dengan profesi lain seperti profesi pengacara dan dokter. Profesi pengacara dan dokter dalam menjalankan keahliannya menerima penghasilan (*fee*) dari kliennya, dan mereka berpihak pada kliennya. Profesi akuntan publik juga menerima penghasilan dari kliennya; namun dalam menjalankan profesinya akuntan publik harus independen (tidak memihak kepada kliennya). Akuntan diharapkan independen oleh karena yang memanfaatkan hasil pemeriksaannya terutama adalah pihak lain, selain kliennya (Mulyadi, 1990 : 21). Independensi akuntan publik dalam melaksanakan

keahliannya adalah hal yang pokok, meskipun akuntan dibayar oleh klien atas jasa yang diberikannya tersebut. Independensi akuntan publik akan diragukan apabila ia menerima penghasilan selain yang telah ditentukan dalam kontrak kerja. Adanya penghasilan bersyarat (*contingent fee*) yang jumlahnya banyak dari seorang klien yang diaudit tidak diperkenankan. Dalam Rule 302-*Contingency fees, code of professional Ethics* AICPA (tahun 1989) dijelaskan bahwa: jasa professional tidak boleh ditawarkan atau dibebankan berdasarkan suatu perjanjian di mana penghasilan tidak akan dibayar kecuali menemukan atau menghasilkan temuan yang khusus. Penghasilan didasarkan pada persyaratan atau hasil dari pemberian jasa tersebut. Namun penghasilan akuntan publik dapat berbeda tergantung pada kerumitan tugas yang dilakukan (Mulyadi,1990:21).

Dalam rapat komisi kode etik akuntan Indonesia tahun 1990 telah ditegaskan bahwa imbalan yang diterima selain penghasilan dalam kontrak dan penghasilan bersyarat tidak boleh diterapkan dalam penugasan pemeriksaan. Dalam kode etik tersebut dijelaskan: dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan laporan keuangan, dilarang menerima imbalan lain selain honorarium untuk penugasan yang bersangkutan. Honorarium tersebut tidak boleh tergantung pada manfaat yang akan diperoleh kliennya.(Kode Etik IAI,1990 pasal 6, butir 5).

*Independence in fact* dan *independence in appearance* suatu kantor akuntan publik perlu diragukan, apabila penghasilan yang diterima dari seorang klien merupakan bagian yang signifikan dari keseluruhan penghasilan kantor akuntan publik tersebut. Pihak yang berpendapat bahwa penghasilan audit yang besar dapat mengurangi independensi, mungkin didasarkan pada alasan-alasan sebagai

berikut:

- (1). Kantor akuntan yang menerima penghasilan audit besar merasa tergantung pada klien, meskipun pendapat klien mungkin tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau mengakibatkan akuntan pemeriksa tidak dapat melaksanakan norma pemeriksaan akuntan dengan secukupnya.
  - (2). Kantor akuntan yang menerima penghasilan audit besar dari seorang klien takut kehilangan klient tersebut karena akan kehilangan sebagian besar penghasilannya sehingga kantor akuntan tersebut cenderung tidak independen.
  - (3). Kantor akuntan cenderung memberikan "*counterpartfee*" yang besar kepada salah satu atau beberapa pejabat kunci klien yang diaudit, meskipun hal ini dilarang oleh kode etik, sehingga tindakan ini cenderung menimbulkan hubungan yang tidak independen dengan kliennya.
- Supriyono, (1988:60)

### **7).Hubungan Personal**

Hubungan personal yang meliputi hubungan famili, keluarga, sahabat dekat menimbulkan keadaan yang mungkin merusak independensi akuntan publik. Dijelaskan oleh AICPA (tahun 1989) dengan interpretasi Rule 101-1 tentang pengaruh hubungan famili terhadap independensi. Berbagai macam hubungan keluarga dalam kaitan dengan independensi adalah sebagai berikut :

- (1). Hubungan keluarga dan usaha yang berasal dari anggota. Independensi akuntan publik mungkin akan rusak oleh kepentingan keuangan dan usaha

antara klien dengan suami atau istri anggota, anak-anak yang masih menjadi tanggungan anggota, atau sanak keluarga yang tinggal secepat dengan atau menjadi tanggungan anggota. Kepentingan keuangan dan hubungan usaha yang berasal dari keluarga tersebut diatas terhadap klien dianggap mempengaruhi atau relatif merusak independensi akuntan publik.

(2). Hubungan keuangan dan usaha yang mungkin berasal dari anggota keluarga. *Keluarga dekat*: hubungan keluarga dekat mungkin juga menimbulkan keadaan-keadaan lain yang merusak independensi dalam penampilan. Akan tetapi, tidak masuk akal untuk menganggap bahwa semua hubungan keluarga dekat akan mengakibatkan rusaknya independensi dalam penampilan akuntan publik karena keluarga dekat yang letaknya terlalu jauh mungkin tidak mengakibatkan rusaknya independensi. Berikut ini merupakan pedoman pengaruh keluarga dekat pada independensi dalam penampilan yang berkembang akhir-akhir ini:

- a). Timbul suatu anggapan bahwa independensi penampilan rusak karena kepentingan keuangan yang cukup berarti, investasi, atau hubungan usaha antara klien dengan keluarga dekat anggota berikut ini; anak-anak yang sudah tidak menjadi tanggungan, kakak atau adik baik laki-laki atau perempuan, kakek dan nenek, orang tua, mertua, dan istri atau suami terdahulu.
- b). Jika kepentingan keuangan keluarga dekat tersebut merupakan jumlah yang material dihubungkan dengan kekayaan bersihnya,

maka pihak ketiga dapat menyimpulkan bahwa obyektifitas anggota terhadap kliennya menjadi rusak dengan adanya hubungan dengan keluarga dekat yang tertutup tersebut. Sebagai tambahan, kepentingan keuangan yang dimiliki oleh keluarga dekat anggota dapat mengakibatkan timbulnya kepentingan keuangan tidak langsung bagi anggota.

- c). Independensi dalam penampilan anggota juga dianggap rusak jika keluarga dekat anggota tersebut memegang peranan cukup penting atau memegang tanggung jawab posisi eksekutif (misalnya sebagai direktur, kepala eksekutif, atau pejabat keuangan) di dalam perusahaan klien.
  - d). Pemisahan geografis dan frekuensi hubungan yang jarang antara keluarga dekat dengan anggota dapat mengurangi kesan rusaknya independensi.
- (3). Hubungan keluarga dan bisnis yang umumnya tidak dianggap berasal dari anggota.

*Keluarga jauh:* terdapat suatu anggapan bahwa independensi penampilan tidak rusak dengan adanya hubungan keuangan dan usaha antara keluarga jauh dan anggota dengan kliennya. Keluarga jauh tersebut meliputi: paman, bibi, kemenakan laki-laki dan perempuan, saudara sepupu, saudara ipar dan keluarga jauh lainnya.

Kepentingan keuangan dan hubungan usaha keluarga jauh tersebut tidak dipertimbangkan berasal dari anggota, baik kepentingan secara langsung atau tidak langsung. Namun, anggapan bahwa keluarga jauh tidak merusak independensi ini berubah jika faktor-faktor lainnya menunjukkan indikasi adanya hubungan tertutup, sebagai contoh keluarga jauh tersebut tinggal bersama di dalam satu rumah, mempunyai ikatan keuangan, atau berpartisipasi secara patungan dalam perusahaan lainnya.

## **2.6. Pemantauan IAI Terhadap Independensi Anggota**

Independensi dan obyektifitas adalah tulang punggung profesi akuntan publik. Akuntan publik harus bisa menjaga sikap dalam menjalankan tugas profesinya agar masyarakat tetap percaya kepada profesi akuntan publik. Aturan sikapnya dinyatakan secara tegas dalam Standar Auditing Umum ke 2 dan kode etik akuntan Indonesia. Anggota IAI mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi aturan dalam kode etik akuntan Indonesia. Kewajiban untuk mematuhi Kode Etik ini tidak hanya akuntan yang menjadi anggota IAI saja, tapi meliputi semua pihak yang bekerja dalam praktek profesi akuntan publik. Anggota profesi juga tidak diperkenankan membiarkan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan atas namanya melanggar kode etik profesi. Profesi akuntan publik harus dapat mempertahankan independensi dan obyektifitas dalam mempertimbangkan fakta yang dihadapi saat melaksanakan audit, karena tanpa adanya jaminan sikap independensi dan obyektifitas akuntan publik, masyarakat akan meragukan pendapat yang diberikan akuntan publik atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya.

IAI mencantumkan aturan independensi secara rinci dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Aturan-aturan tersebut merupakan pedoman bagi akuntan publik untuk bersikap independen dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya, sehingga hasil kerjanya memiliki keandalan tinggi dan dapat melindungi kepentingan masyarakat. IAI memantau anggota dalam menjaga sikap mental independensinya dengan mensyaratkan dilakukan *peer review* terhadap suatu kantor akuntan publik (KAP) oleh KAP lain atau komite yang terdiri atas anggota yang ditunjuk. *Peer Review* merupakan tinjauan pembandingan kinerja KAP tersebut. Tinjauan ini terdiri atas studi dan evaluasi sistem standar mutu KAP termasuk sikap independensi, melakukan uji kepatuhan KAP tersebut atas kebijakan dan prosedur standar mutunya. Tujuan *peer review* adalah untuk menyatakan pendapat bahwa standar mutu KAP tersebut sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Hasil *peer review* kemudian disimpulkan bahwa KAP tersebut independen dan hasil kerjanya dapat diandalkan dan dipercaya. Jika hasil *peer review* ditemukan bukti ketidakpatuhan terhadap standar mutu profesi ataupun kurang independen dalam kerjanya, maka IAI dapat mengenakan sanksi atasnya. Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan, teguran, *peer review* khusus, hingga yang paling berat dikeluarkan dari keanggotaan IAI.

IAI membentuk dewan kehormatan untuk menjaga ketaatan anggotanya dalam mematuhi kode etik akuntan Indonesia. Dewan kehormatan diangkat dan bertanggung jawab terhadap Kongres IAI yang beranggotakan lima orang anggota IAI. Dewan ini bertindak atas dasar pengaduan tertulis, atau bila perlu atas permintaan pengurus IAI mengenai pelanggaran kode etik akuntan Indonesia

yang dilakukan anggota IAI. Dewan kebormatan mengenakan sanksi atas pelanggaran kode etik sesuai ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI. Hubungan antara kode etik akuntan Indonesia dengan standar profesi akuntan publik sangat erat yaitu memberi garis tegas mengenai keharusan akuntan publik bersikap independen dan obyektif dalam melaksanakan tugas profesinya. Standar umum ke 2 menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Pernyataan ini kemudian dipertegas lagi dalam Kode Etik pasal 12, 13 dan 14; selanjutnya standar umum ke 3 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan saksama, yang kemudian dirinci lagi dalam kode etik pasal 15, 16 dan 17.

Hubungan antara kode etik dan standar profesi akuntan publik ini menegaskan bahwa tidak saja harus menumbuhkan sikap mental independen dalam dirinya (*in fact*), namun harus juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa dirinya independen (*in appearance*). Akuntan publik harus memiliki kecakapan profesional dan independensi dalam mempertimbangkan fakta yang dihadapinya; sehingga masyarakat tidak meragukan hasil auditnya.

## **2.7. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik telah dilakukan di Amerika Serikat, Inggris dan di Indonesia. Penelitian tersebut meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik dan tidak meneliti independensi dalam fakta.

Di Amerika Serikat penelitian mengenai independensi akuntan publik dilakukan antara lain oleh Lavin (1976), Shockley (1981). Lavin meneliti tiga faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik yang meliputi: (1) Ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) pemberian jasa lain selain jasa audit, (3) lamanya hubungan audit dengan klien. Hasilnya penelitiannya menunjukkan bahwa, tidak ada perbedaan persepsi antara AICPA dengan para pemakai laporan keuangan dan hubungan usaha yang dapat mengurangi independensi akuntan publik, tetapi beberapa keadaan yang oleh AICPA dianggap dapat mengurangi atau meniadakan independensi akuntan publik, ternyata oleh pemakai laporan akuntansi dianggap tidak mengganggu independensi akuntan publik. Demikian pula mengenai jasa lain selain jasa audit dan hubungan audit yang lama dengan klien tertentu ternyata ada perbedaan persepsi antara pendapat AICPA dengan pendapat para pemakai laporan audit.

Shockley (1981) meneliti empat faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik yaitu (1) pemberian jasa konsultasi kepada klien, (2) persaingan antar kantor akuntan publik, (3) ukuran kantor akuntan publik, (4) lamanya hubungan audit. Hasilnya penelitiannya menunjukkan bahwa kantor akuntan publik yang memberikan jasa konsultasi manajemen kepada klien yang diaudit, meningkatkan resiko rusaknya independensi akuntan publik. Kantor akuntan publik yang kecil mempunyai resiko kehilangan independensi yang lebih besar, dibandingkan dengan kantor akuntan publik besar. Lamanya hubungan audit dengan klien tertentu tidak mempengaruhi secara signifikan independensi akuntan publik.

Di Inggris penelitian mengenai independensi akuntan publik telah dilakukan oleh Firth (1986). Firth meneliti peranan dan pentingnya auditor independen yang dipersepsikan oleh pihak yang berkepentingan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak independen dirasakan oleh responden untuk menghalangi melakukan investasi dan keputusan memberikan pinjaman.

Di Indonesia penelitian mengenai independensi akuntan publik dilakukan oleh Supriyono (1988). Supriyono mengidentifikasi enam faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik yang meliputi :

- Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien.
- Persaingan antar Kantor Akuntan Publik
- Pemberian jasa lain selain jasa audit,
- Lamanya penugasan audit
- Besarnya Kantor Akuntan Publik
- Besarnya fee audit.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa responden yang mengadakan ikatan keuangan dengan perusahaan klien dan hubungan bisnis dengan klien mempengaruhi rusaknya independensi akuntan publik sebesar 78 %. Persaingan yang tajam dalam pemberian jasa audit antar kantor akuntan publik mempengaruhi rusaknya independensi akuntan publik sebesar 48%. Fee audit mempengaruhi rusaknya independensi akuntan publik sebesar 42 %. Lamanya penugasan audit suatu kantor akuntan pada klien tersebut mempengaruhi rusaknya independensi akuntan publik sebesar 34 %. Ukuran kantor akuntan publik kecil mempengaruhi rusaknya independensi akuntan publik sebesar 27%. Pemberian

jasa lain selain jasa audit mempengaruhi rusaknya independensi akuntan publik sebesar 8 %.

Nadirsyah (1993), meneliti tentang Persepsi Pemakai Informasi Akuntansi, Akuntan dan Masyarakat Umum terhadap independensi akuntan publik. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga kelompok sampel tersebut mempunyai persepsi yang berbeda terhadap independensi akuntan publik.

Suyatmini (2002), meneliti tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien berpengaruh negatif terhadap independensi. Pemberian jasa lain selain jasa audit berpengaruh negatif terhadap independensi. Lamanya penugasan audit berpengaruh negatif terhadap independensi. Persaingan antar kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap independensi. Ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap independensi. Fee audit berpengaruh negatif terhadap independensi. Hubungan sosial berpengaruh negatif terhadap independensi.

Penelitian-penelitian tersebut di atas memberikan inspirasi dalam penelitian ini, terutama dalam penyusunan atribut-atribut independensi akuntan publik. Atribut tersebut dikembangkan dalam pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mendapat jawaban sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut.

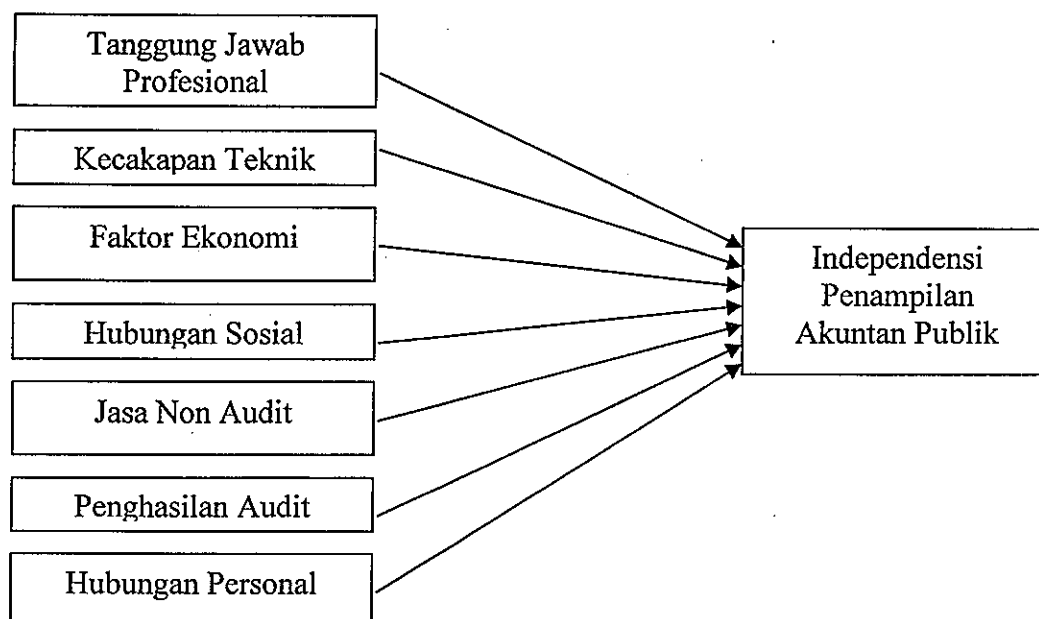
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah: *Pertama*, dalam penelitian ini subyek yang diteliti adalah pemakai jasa audit pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pemakai jasa audit BPR dibatasi pada BPR yang terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) Propinsi Jawa Tengah tahun 2002. *Kedua*, penelitian ini meneliti persepsi BPR atas tujuh faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik. *Ketiga*, dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

## 2.8. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan berikut:

**Gambar 2.**

*Hubungan Tanggung Jawab Profesional, Kecakapan Teknik, Faktor Ekonomi, Hubungan Sosial, Jasa Non Audit, Penghasilan Audit, Hubungan Personal dengan klien terhadap Independensi Penampilan Akuntan Publik.*



## 2.9. Perumusan Hipotesis.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Tanggung jawab profesional berpengaruh positif terhadap independensi penampilan akuntan publik.
- H<sub>2</sub>: Kecakapan teknik berpengaruh positif terhadap independensi penampilan akuntan publik.
- H<sub>3</sub>: Faktor ekonomi berpengaruh negatif terhadap independensi penampilan akuntan publik.
- H<sub>4</sub>: Hubungan sosial berpengaruh negatif terhadap independensi penampilan akuntan publik.
- H<sub>5</sub>: Pemberian jasa lain selain jasa audit berpengaruh negatif terhadap independensi penampilan akuntan publik.
- H<sub>6</sub>: Penghasilan audit berpengaruh negatif terhadap independensi penampilan akuntan publik.
- H<sub>7</sub>: Hubungan personal berpengaruh negatif terhadap independensi Penampilan akuntan publik.
- H<sub>8</sub>: Tanggung jawab profesional, kecakapan teknik auditor, faktor ekonomi, hubungan sosial, pemberian jasa lain selain jasa audit, penghasilan audit (audit fee), hubungan personal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap independensi penampilan akuntan publik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sumber Data**

Data penelitian secara umum dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu: data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini juga diperlukan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari para responden melalui kuesioner yang diberikan kepada para pimpinan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) cabang Jawa Tengah tahun 2002. Data sekunder adalah data yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan dasar-dasar teoritis tentang independensi akuntan publik yang didapat dari berbagai literatur di perpustakaan.

#### **3.2. Populasi dan teknik pengambilan sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah BPR yang terdaftar sebagai anggota Perbarindo Jawa Tengah tahun 2002 yang berjumlah 587 BPR yang tersebar di kota madya dan kabupaten propinsi Jawa Tengah. BPR yang dijadikan responden diwakili oleh para direktur, manajer operasional dan bagian akunting BPR. Pemilihan BPR sebagai responden dalam penelitian ini dilakukan atas pertimbangan bahwa BPR adalah kelompok UKM yang telah mengenal dengan baik profesi akuntan publik dan berinteraksi secara langsung dengan akuntan publik sebagai pemakai jasa profesinya.

Penelitian dilakukan dengan metode mail survey, yaitu para responden dikirim daftar kuesioner melalui pos dan disertai amplop dan perangko jawaban

secukupnya. Jumlah kuesioner yang akan dikirim sebanyak 587 eksemplar sesuai dengan jumlah BPR yang terdaftar sebagai anggota Perbarindo Jawa Tengah tahun 2002. Seluruh populasi BPR di Jawa Tengah yang berjumlah 587 BPR dikirim kuesioner didasarkan pada pertimbangan bahwa tingkat respon rate di Indonesia hanya 10 %, (Nur Indriantoro, 1993); dan jumlah data yang dibutuhkan seperti pada penelitian-penelitian terdahulu yaitu antara 50–100 responden.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner yang dikirimkan langsung kepada responden melalui pos (mail survey). Kuesioner tersebut terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi sejumlah pertanyaan yang bersifat umum. Bagian kedua berisi pertanyaan yang berhubungan dengan independensi akuntan publik. Kuesioner yang dikirim disertai surat permohonan yang berisi penjelasan tentang tujuan penelitian yang dilakukan. Petunjuk pengisian kuesioner dibuat sangat sederhana dan sejelas mungkin untuk memudahkan pengisian jawaban responden sesungguhnya dengan lengkap.

Sebelum kuesioner dikirim langsung kepada responden sesungguhnya, terlebih dahulu peneliti melakukan pre-test yang diberikan kepada beberapa mahasiswa program Magister Akuntansi Undip yang seangkatan dengan peneliti. Pre-test bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kuesioner yang digunakan dapat dipahami maksudnya, dan tidak menimbulkan kesulitan dalam menangkap maksud pertanyaan yang diajukan.

Pengiriman kuesioner kepada responden dilakukan dengan memakai jasa pos (mail survey). Jangka waktu yang diberikan kepada responden untuk

mengembalikan kuesioner selama tiga minggu. Apabila dalam seminggu setelah batas waktu pengembalian ditentukan kuesioner tidak dikembalikan, maka dikirimkan lagi kuesioner susulan kepada responden

#### **3.4. Teknik Pengukuran Operasional Variabel**

Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian empiris. Untuk melakukan pengujian atas hipotesis-hipotesis yang diajukan, maka variabel-variabel yang diteliti yakni persepsi BPR mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik harus diukur.

Pengukuran variabel-variabel tersebut dilakukan dengan cara yaitu kepada responden BPR (direktur, manajer dan bagian akunting) diajukan pertanyaan yang berhubungan dengan independensi penampilan akuntan publik dan diukur dengan teknik skala Likert. Nilai skala yang digunakan adalah skala ordinal. Dengan teknik skala Likert ini, para responden diminta untuk memberikan jawaban sampai seberapa jauh ia setuju atau tidak setuju atas sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan independensi penampilan akuntan publik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikembangkan dari atribut-atribut yang telah diidentifikasi terlebih dahulu.

Variabel-variabel independensi akuntan publik dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Lavin (1976), Firth (1990), Supriyono (1988) dan Nadirsyah (1993) kemudian dipilih yang paling relevan dengan kondisi di Indonesia, khususnya responden BPR. Pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel dependen (Y) yaitu independensi penampilan akuntan publik, dan variabel-variabel independen ( $X_1$

sampai dengan  $X_7$ ) yang berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**OPERASIONAL VARIABEL DAN PERTANYAAN YANG**  
**BERHUBUNGAN DENGAN INDEPENDENSI PENAMPILAN**  
**AKUNTAN PUBLIK**

OPERASIONAL VARIABEL	PERTANYAAN
(Y) Independensi Penampilan Akuntan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap mental independen</li> <li>2. Sikap jujur</li> <li>3. Idealisme</li> </ol>
(X <sub>1</sub> ) Tangung Jawab Profesional	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melayani kepentingan umum</li> <li>5. Mengetahui tanggung jawab hukum</li> <li>6. Memiliki tanggung jawab terhadap tugas profesionalnya</li> </ol>
(X <sub>2</sub> ) Kecakapan Teknik	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Memiliki kecakapan teknik auditing</li> <li>8. Memiliki kecakapan teknik akuntansi</li> </ol>
(X <sub>3</sub> ) Hubungan Ekonomi dengan Klien	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Bebas dari pengaruh pihak lain dalam kantor akuntan publik</li> <li>10. Tidak memiliki investasi bersama dengan klien</li> <li>11. Tidak memiliki hutang piutang dengan klien</li> <li>12. Tidak memiliki saham klien</li> <li>13. Partnernya tidak memiliki saham perusahaan klien</li> <li>14. Tidak bertindak sebagai penjamin emisi, promotor, direktur, karyawan penting, trustee dana pensiun atau sejenisnya.</li> <li>15. Tidak ada ikatan kepentingan dengan bank selama pengauditan</li> <li>16. Partner tidak mengelola bangunan milik klien</li> <li>17. tidak menyewa bangunan klien untuk kantor</li> </ol>
(X <sub>4</sub> ) Hubungan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>18. Tidak menjadi anggota yayasan social bersama dengan klien</li> <li>19. Tidak menjadi pengurus pada yayasan social</li> </ol>
(X <sub>5</sub> ) Pemberian Jasa Non Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>20. Tidak memberikan jasa lain selain jasa audit: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konsultasi manajemen</li> <li>b. Penyusunan system akuntansi</li> <li>c. Kosultasi perpajakan</li> <li>d. Studi kelayakan</li> <li>e. Pendidikan dan pelatihan</li> <li>f. Pemeriksaan khusus</li> <li>g. Recruitmen karyawan</li> </ol> </li> <li>21. Tidak mempersiapkan gaji eksekutif</li> <li>22. Tidak menyewa komputer klien</li> <li>23. Tidak bergelar Sarjana hukum dan memberikan jasa legal</li> </ol>
(X <sub>6</sub> ) Penghasilan Audit (audit fee)	<ol style="list-style-type: none"> <li>24. Tidak menerima keuntungan selain fee yang</li> </ol>

	<p>telah ditentukan</p> <p>25. Tidak menetapkan fee berdsarkan manfaat yang akan diterima klien</p> <p>26. Fee yang diterima tidak merupakan bagian terbesar dari total penghasilan kantor akuntan</p>
(X <sub>7</sub> ) Hubungan Personal	<p>27. Istri atau anak tidak memiliki saham perusahaan klien</p> <p>28. Orang tua, kakek, nenek, saudara tidak memiliki saham perusahaan klien</p> <p>29. Anak akuntan publik tidak menjadi direktur atau komisaris pada perusahaan klien</p> <p>30. Orang tua, kakek, nenek, saudara tidak menjadi direktur atau komisaris pada perusahaan klien</p> <p>31. Tidak mengaudit perusahaan sahabat dekat</p> <p>32. Saudara kandung atau ipar tidak menduduki posisi penting pada perusahaan klien</p>

Setiap variabel dikembangkan dalam bentuk pertanyaan, dan diajukan kepada responden dengan meminta mereka untuk menyatakan sejauh mana kesetujuan mereka terhadap masing-masing pertanyaan tersebut. Setiap pertanyaan responden diminta untuk memilih salah satu pilihan jawaban dengan skor: (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat setuju.

Dari 32 pertanyaan yang diajukan, pertanyaan nomor 1 sampai dengan pertanyaan nomor 9 bersifat positif, maka alternatif jawaban yang tersedia diberikan skor sebagai berikut:

“Sangat Tidak setuju” (STS)	skor	1
“Tidak Setuju” (TS)	skor	2
“Netral” (N)	skor	3
“Setuju” (S)	skor	4
“Sangat Setuju” (ST)	skor	5

Pertanyaan nomor 10 sampai dengan pertanyaan nomor 32 bersifat negatif sehingga alternatif jawaban yang tersedia mempunyai skor sebagai berikut:

“Sangat Tidak Setuju” (STS)	skor	5
“Tidak Setuju” (TS)	skor	4
“Netral” (N)	skor	3
“Setuju” (S)	skor	2
“Sangat Setuju” (ST)	skor	1

### 3.5. Teknik Analisa Data

Data penelitian yang diperoleh dianalisa dengan alat statistik yang meliputi:

#### 1). Uji Kualitas Data

Menurut Huck dan Cormier (1996), kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan pada masing-masing butir pertanyaan yang dikelompokkan berdasarkan variabel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing butir pernyataan mempunyai hubungan yang besar terhadap nilai tiap variabelnya. Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara item dengan fungsi ukuran secara keseluruhan. Sebuah butir dinyatakan valid bila memiliki koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$ .

Uji reliabilitas dilakukan pada butir-butir yang telah valid. Teknik untuk menguji reliabilitas instrumen yaitu dengan koefisien Cronbach Alpha. Instrumen dikatakan handal (reliable) apabila memiliki Cronbach alpha lebih dari 0,60 (Nunnally, 1969).

## **2). Uji Non Response Bias**

Data yang dikumpulkan melalui jasa pos perlu dilakukan uji response bias. Uji non response bias ini bertujuan untuk melihat karakteristik jawaban responden yang mengembalikan kuesioner dan yang tidak mengembalikan kuesioner (non respondents). Tes ini membagi dua kelompok yaitu 1) kelompok awal yaitu kelompok yang mengembalikan kuesioner yang diisinya sejak awal sampai batas waktu pengembalian 2) kelompok akhir (late respon) yaitu kelompok responden yang mengirimkan kembali kuesioner setelah satu minggu dari batas yang ditentukan. Pengujian non respon bias atas variabel yang diamati dalam penelitian ini menggunakan  $t_{test}$ .

## **3). Uji Asumsi Klasik**

Sehubungan dengan pemakaian metode regresi linier berganda dalam penelitian ini, maka untuk menghindari asumsi-asumsi klasik dilakukan pengujian sebagai berikut:

### **3a). Uji Multikolinieritas**

Digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendiagnosa adanya multikolinieritas adalah dengan memperhatikan nilai tolerance dan nilai VIF (variance inflation factor). Nilai cut off yang umum digunakan dalam model regresi harus mempunyai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 (Iman Ghozali,2001 hal.57).

### 3b). Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model yang terbebas dari autokorelasi. Deteksi terhadap autokorelasi digunakan Durbin Watson (DW) test dan run test. Langkah-langkah untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah (1) jika ada nilai  $p$  value untuk DW maka deteksi ada tidaknya Autokorelasi dilihat dari  $p$  value tersebut atau dengan cara melihat nilai DW dan kemudian melakukan mapping dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika DW terletak di daerah + auto atau - auto maka sudah pasti bahwa regresi tersebut mengandung autokorelasi
- Jika DW terletak di daerah no auto maka tidak ada Autokorelasi
- Jika terletak di daerah indication maka mapping in tidak dapat menentukan ada atau tidaknya autokorelasi.
- Jika tidak dapat menentukan ada tidaknya autokorelasi maka langkah yang diambil untuk mendektaksinya adalah dengan melakukan run test

### **3c). Uji Heteroskedastisitas**

Dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak-samaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Singgih Santoso, 2000 : 210).

### **3d). Uji Normalitas**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing data pada variabel yang diteliti terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas ini menggunakan analisa grafik yaitu melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Pengujian ini juga dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Iman Ghozali, 2001 hal.74).

### **4). Uji Hipotesis**

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (multiple regression). Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian ini, metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variable independen dalam suatu model prediktif tunggal. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam rumus sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

Dimana:

Y	=	Independensi Penampilan Akuntan Publik
X <sub>1</sub>	=	Tanggung Jawab Professional
X <sub>2</sub>	=	Kecakapan Teknik
X <sub>3</sub>	=	Faktor Ekonomi
X <sub>4</sub>	=	Hubungan Sosial
X <sub>5</sub>	=	Pemberian Jasa Lain selain Jasa Audit
X <sub>6</sub>	=	Penghasilan Audit
X <sub>7</sub>	=	Hubungan Personal
$\beta_0$	=	Intercept
$\beta_1$	=	koefisien variabel tanggung jawab professional
$\beta_2$	=	koefisien variabel kecakapan teknik
$\beta_3$	=	koefisien variabel faktor ekonomi
$\beta_4$	=	koefisien variabel hubungan sosial
$\beta_5$	=	koefisien variabel pemberian jasa lain selain jasa audit
$\beta_6$	=	koefisien variabel penghasilan audit
$\beta_7$	=	koefisien variabel hubungan personal
e	=	error

Adapun cara pengujiannya dilakukan dengan:

#### 4a). Pengujian terhadap koefisien regresi (uji parsial).

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji t atau dengan menggunakan P value. Dalam uji-t dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

Rumus:  $t_{hitung} = \frac{b_i}{Se\ b_i}$  (Sudjana, 1992:111)

Keterangan:

$t_{hitung}$  = t hasil perhitungan

$b_i$  = koefisien regresi

$Se\ b_i$  = standar error

Hipotesis diterima jika:

1.  $t_{hitung} > t_{tabel}$

2.  $P_{value} < 0.05$

**4b). Pengujian terhadap Pengaruh Variabel Independen secara bersama (simultan)**

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen, digunakan uji F, dengan rumus sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2(N - (k + 1))}{(1 - R^2)(k)}$$

Keterangan:

$F_{hitung}$  = hasil perhitungan

$R^2$  = koefisien determinasi

k = jumlah variabel independen

N = jumlah sampel

**Hipotesis diterima:**

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$

## **BAB IV**

### **ANALISA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan yang dilakukan dalam bab ini meliputi 1) analisa hasil pengumpulan data 2) analisa kualitas data (instrumen) 3) analisa pengujian asumsi 4) analisa pengujian hipotesis.

#### **4.1. Analisa Hasil Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari 2003. Pada tahap pertama kuesioner dikirimkan kepada responden melalui pos sebanyak 587 eksemplar. Setelah ditunggu selama tiga minggu jumlah kuesioner yang diterima kembali dari responden sebanyak 68 buah. Pengiriman tahap kedua tidak dilakukan, oleh karena jumlah kuesioner yang diterima kembali pada pengiriman pertama telah mencapai jumlah yang sesuai dengan jumlah sample yang ditentukan, yaitu 10 % dari jumlah populasi BPR di propinsi Jawa Tengah. Dari 68 kuesioner yang diterima tersebut, yang memenuhi kriteria (pernah diaudit akuntan publik) berjumlah 62 kuesioner. Sisanya sejumlah 6 kuesioner tidak memenuhi syarat, (belum pernah diaudit akuntan publik). Dengan demikian hanya 62 kuesioner yang memenuhi syarat untuk diolah sebagai data penelitian.

#### **4.2. Analisa Pengujian Kualitas Data**

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data yang meliputi :

#### 4.2.1 Uji validitas

Uji validitas atau uji kesahihan dilakukan untuk mengukur pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Suatu pertanyaan baru dikatakan valid atau sah apabila pertanyaan itu mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan.

Perhitungan komputer dengan bantuan program SPSS versi 11,00 diperoleh hasil pengujian validitas seperti disajikan pada (lampiran 3). Sebuah butir dinyatakan valid bila memiliki koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 5%. Nilai  $r_{tabel}$  untuk  $N = 62$  ( $p=5\%$ ) sebesar 0,2464 (Lampiran 5); sehingga butir-butir hasil uji validitas yang memiliki koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) lebih besar dari 0,2464 dinyatakan sebagai butir yang valid.

Hasil pengujian validitas yang telah dilakukan tersebut dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas Data**

Variabel	Jlh. Butir Pertanyaan	Koefisien Korelasi ( $r_{xy}$ )	Keterangan ( $r_{tabel}$ )=0,246 4
(X <sub>1</sub> ) Tangung Jawab Profesional	3	0,719 - 0,824	Valid
(X <sub>2</sub> ) Kecakapan Teknik	2	0,924 - 0,948	Valid
(X <sub>3</sub> ) Hubungan Ekonomi	9	0,482 - 0,804	Valid
(X <sub>4</sub> ) Hubungan Sosial	2	0,879 - 0,888	Valid
(X <sub>5</sub> ) Pemberian Jasa Non Audit	4	0,667 - 0,784	Valid
(X <sub>6</sub> ) Penghasilan Audit	3	0,698 - 0,831	Valid
(X <sub>7</sub> ) Hubungan Personal	6	0,714 - 0,885	Valid
(Y) Independensi Penampilan	3	0,657 - 0,843	Valid

*Sumber: pengolahan data dengan SPSS versi 11,00*

Uji validitas untuk variabel “Tanggung Jawab Profesional” ( $X_1$ ) yang terdiri dari 3 butir pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) berkisar antara 0,719 sampai dengan 0,824. Nilai-nilai tersebut lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  sebesar 0,2464; dengan demikian 3 butir pernyataan pada variabel independen ( $X_1$ ) seluruhnya dinyatakan valid.

Uji validitas untuk variabel “Kecakapan Teknik” ( $X_2$ ) yang terdiri dari 2 butir pernyataan memiliki koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) masing-masing 0,924 dan 0,948; oleh karena nilai-nilai tersebut lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  0,2464, maka kedua butir pertanyaan pada variabel independen ( $X_2$ ) dinyatakan valid.

Uji validitas untuk variabel “Faktor Ekonomi” ( $X_3$ ) yang terdiri dari 9 butir pernyataan memiliki koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) berkisar antara 0,482 sampai dengan 0,804. Nilai-nilai tersebut lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  0,2464, dengan demikian pernyataan-pernyataan pada variabel independen ( $X_3$ ) seluruhnya dinyatakan valid.

Uji validitas untuk variabel “Hubungan Sosial” ( $X_4$ ) yang terdiri dari 2 butir pernyataan memiliki koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) masing-masing 0,879 dan 0,888. Nilai tersebut lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  0,2464, dengan demikian pernyataan pada variabel independen ( $X_4$ ) dinyatakan valid.

Uji validitas untuk variabel “Pemberian Jasa lain selain Jasa Audit” ( $X_5$ ) yang terdiri dari 4 butir pertanyaan memiliki koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) berkisar antara 0,667 sampai dengan 0,784. Nilai-nilai tersebut lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  0,2464 maka seluruh butir pernyataan pada variabel independen ( $X_5$ ) dinyatakan valid.

Uji validitas untuk variabel Penghasilan Audit ( $X_6$ ) yang terdiri dari 3 butir pernyataan memiliki koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) berkisar antara 0,698 sampai dengan 0,831. Nilai-nilai tersebut lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  0,2464 maka seluruh butir pernyataan pada variabel independen ( $X_6$ ) dinyatakan valid.

Uji validitas untuk variabel Hubungan Personal ( $X_7$ ) yang terdiri dari 6 butir pernyataan memiliki koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) berkisar antara 0,714 sampai dengan 0,885. Nilai-nilai tersebut lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  0,2464 maka seluruh butir pernyataan pada variabel independen ( $X_7$ ) dinyatakan valid.

Uji validitas untuk variabel Independensi Akuntan Publik (Y) yang terdiri dari 3 butir pernyataan memiliki koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) berkisar antara 0,657 sampai dengan 0,843. Nilai-nilai tersebut lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  0,2464 maka seluruh butir pernyataan pada variabel dependen (Y) dinyatakan valid.

#### 4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan pada butir-butir pertanyaan yang telah valid. Teknik pengujian reliabilitas butir dengan menggunakan metode Alpha. Hasil pengolahan data dengan bantuan program SPSS versi 11,00 menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas Alpha lebih besar dari 0,6; dengan demikian instrumen penelitian tersebut adalah reliable (Lampiran 3).

Hasil pengujian reliabilitas yang telah dilakukan tersebut dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3

Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Koefisien reliabilitas Alpha ( $r_{tt}$ )	Keterangan
(X <sub>1</sub> ) Tangung Jawab Profesional	0,6282	Reliabel
(X <sub>2</sub> ) Kecakapan Teknik	0,8514	Reliabel
(X <sub>3</sub> ) Hubungan Ekonomi	0,8245	Reliabel
(X <sub>4</sub> ) Hubungan Sosial	0,7188	Reliabel
(X <sub>5</sub> ) Pemberian Jasa Non Audit	0,6832	Reliabel
(X <sub>6</sub> ) Penghasilan Audit	0,6759	Reliabel
(X <sub>7</sub> ) Hubungan Personal	0,8964	Reliabel
(Y) Independensi Penampilan	0,6404	Reliabel

*Sumber: pengolahan data dengan SPSS versi 11,00*

Hasil uji reliabilitas pada di atas menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas Alpha ( $r_{tt}$ ) berkisar antara 0,6713 sampai dengan 0,9121. Nilai-nilai tersebut lebih besar dari nilai 0,60; oleh karena koefisien reliabilitas Alpha ( $r_{tt}$ ) semua variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) lebih besar dari 0,06 maka seluruh butir pertanyaan yang valid tersebut dinyatakan reliabel (andal) dan layak digunakan untuk melakukan penelitian.

### 4.3. Pengujian Asumsi

#### 4.3.1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Hasil pengujian data dengan program SPSS 11.00 seperti pada (lampiran 4) menunjukkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance seperti pada table 3 sebagai berikut

:

**Tabel 4**  
**coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity statistics	
	Tolerance	VIF
(X <sub>1</sub> ) Tangung Jawab Profesional	0,667	1,499
(X <sub>2</sub> ) Kecakapan Teknik	0,711	1,407
(X <sub>3</sub> ) Hubungan Ekonomi	0,966	1,035
(X <sub>4</sub> ) Hubungan Sosial	0,836	1,196
(X <sub>5</sub> ) Pemberian Jasa Non Audit	0,648	1,544
(X <sub>6</sub> ) Audit Fee	0,758	1,319
(X <sub>7</sub> ) Hubungan Personal	0,694	1,441
(Y) Independensi Penampilan		

**a. Dependent variable (Y): Independensi Penampilan Akuntan Publik**

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa ketujuh variabel bebas dalam persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai VIF dan tolerance yang mendekati 1; dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat problem multikolinieritas dalam model regresi penelitian ini.

**4.3.2 Uji Autokorelasi**

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t_{-1}$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari autokorelasi.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan komputer program SPSS versi 11,00 menghasilkan nilai D-W (Durbin Watson) sebesar 1,364 (lampiran 4); oleh karena nilai D-W 1,364 lebih besar dari batas atas (du) 1,77 maka dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **4.3.3 Uji Heteroskedastisitas**

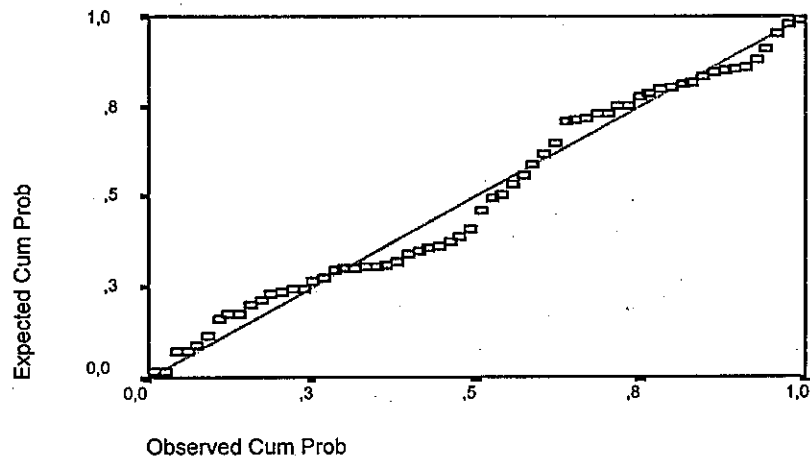
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Imam Ghazali, 2002:69). Dengan menggunakan program SPSS versi 11,00 diperoleh hasil analisa (lihat Lampiran 4).

Dari grafik tersebut di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas maupun dibawah titik angka 0 pada sumbu; hal ini berarti tidak terjadi efek heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model tersebut layak dipakai untuk memprediksi independensi penampilan akuntan publik berdasarkan masukan variabel bebas ( $X_1$  -  $X_7$ ).

#### **4.3.4 Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan pada uji regresi. Pengujian Normalitas ini dilakukan dengan program SPSS versi 11,00 dengan hasil pada Gambar 3 sebagai berikut :

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual  
Dependent Variable: Y



Kaidah pengambilan kesimpulan :

- Jika penyebaran data mengikuti garis normal, maka data berdistribusi normal
- Jika penyebaran data tidak mengikuti garis normal, maka data berdistribusi tidak normal

Jika dilihat berdasarkan grafik di atas, maka data dari semua data berdistribusi normal. Hal ini karena semua data menyebar mengikuti garis Normalitas.

#### 4.4 Pengujian Hipotesis

##### 4.4.1 Pengukuran Terhadap Koefisien Regresi (Uji Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Caranya adalah dengan melakukan pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi semua variabel independen. Berdasarkan pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS versi 11,00 (lihat Lampiran 4) diperoleh koefisien regresi yang dirangkum dalam tabel 5:

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

Variabel	Koefisien regresi	Std error	Beta	T	Sig.
(X <sub>1</sub> ) Tangung Jawab Profesional	0,403	0,127	0,330	3,173	0,002
(X <sub>2</sub> ) Kecakapan Teknik	0,403	0,117	0,347	3,451	0,001
(X <sub>3</sub> ) Hubungan Ekonomi	-0,178	0,033	-0,459	-5,32	0,000
(X <sub>4</sub> ) Hubungan Sosial	0,00822	0,119	0,064	0,689	0,494
(X <sub>5</sub> ) Pemberian Jasa Non Audit	-0,004686	0,081	-0,061	-0,578	0,566
(X <sub>6</sub> ) Penghasilan audit (audit fee)	-0,00418	0,072	-0,057	-0,583	0,562
(X <sub>7</sub> ) Hubungan Personal	0,00558	0,044	0,130	1,272	0,209
Konstanta	9,236			4,398	0,000
Y					
Standar error of estimate = 1,13214					

Sumber: pengolahan data dengan program SPSS versi 11,00

Berdasarkan hasil perhitungan seperti pada table 4 di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 - b_3 X_3 + b_4 X_4 - b_5 X_5 - b_6 X_6 + b_7 X_7$$

$$Y = 9,236 + 0,403X_1 + 0,403X_2 - 0,178X_3 + 0,00822X_4 - 0,00468X_5 - 0,0418X_6 + 0,00558X_7$$

Penjelasan persamaan:

- Y = Variabel Dependen Independensi Penampilan Akuntan Publik
- X<sub>1</sub> = Variabel Independen Tanggung Jawab Profesional
- X<sub>2</sub> = Variabel Independen Kecakapan Teknik
- X<sub>3</sub> = Variabel Independen Faktor Ekonomi
- X<sub>4</sub> = Variabel Independen Hubungan Sosial
- X<sub>5</sub> = Variabel Independen Pemberian Jasa Lain selain Jasa Audit
- X<sub>6</sub> = Variabel Independen Penghasilan Audit
- X<sub>7</sub> = Variabel Independen Hubungan Personal
- β<sub>0</sub> = Intercept (konstanta) : 9,236 menunjukkan nilai konstanta atau nilai tetap yang tidak terpengaruh oleh perubahan variabel independen (X<sub>1</sub> sampai dengan X<sub>7</sub>).

- $\beta_1$  = koefisien variabel independen ( $X_1$ ) menunjukkan nilai 0,403 artinya jika variabel tanggung jawab profesional dinaikan 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka akan menyebabkan kenaikan variabel dependen Independensi Penampilan Akuntan Publik sebesar 0,403 satuan.
- $\beta_2$  = koefisien variabel independen ( $X_2$ ) menunjukkan nilai 0,403 artinya jika variabel kecakapan teknik dinaikan 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka akan menyebabkan kenaikan variabel dependen Independensi Penampilan Akuntan Publik sebesar 0,403 satuan.
- $\beta_3$  = koefisien variabel ( $X_3$ ) menunjukkan nilai -0,178 artinya jika variabel independen hubungan ekonomi dinaikan 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka akan menyebabkan penurunan variabel dependen Independensi Penampilan Akuntan Publik sebesar -0,178 satuan.
- $\beta_4$  = koefisien variabel independen ( $X_4$ ) menunjukkan nilai 0,00822 artinya jika variabel hubungan sosial dinaikan 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka akan menyebabkan kenaikan variabel dependen Independensi Penampilan Akuntan Publik sebesar 0,00822 satuan.
- $\beta_5$  = koefisien variabel ( $X_5$ ) menunjukkan nilai - 0,00468 artinya jika variabel independen pemberian jasa lain selain jasa audit dinaikan 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka akan menyebabkan penurunan variabel dependen Independensi Penampilan Akuntan Publik sebesar - 0,00468 satuan.
- $\beta_6$  = koefisien variabel ( $X_6$ ) menunjukkan nilai - 0,0418 artinya jika variabel independen penghasilan audit dinaikan 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka akan

menyebabkan penurunan variabel dependen Independensi Penampilan Akuntan Publik sebesar - 0,0418 satuan.

$\beta_7$  = koefisien variabel ( $X_7$ ) menunjukkan nilai 0,00558 artinya jika variabel hubungan personal dinaikan 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka akan menyebabkan kenaikan variabel dependen Independensi Penampilan Akuntan Publik sebesar 0,00558 satuan.

**1). Persepsi BPR mengenai pengaruh tanggung jawab profesional terhadap independensi penampilan akuntan publik.**

Hasil perhitungan seperti disajikan pada tabel 4 di atas menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 3,173 dan  $t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5%, didapat angka 2,3044 (lampiran 5); oleh karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,173 > 2,3044$ ) atau  $p\ value < 0,05$  ( $0,002 < 0,05$ ), maka berdasarkan hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi BPR, tanggung jawab profesional berpengaruh positif secara signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. Hasil perhitungan ini sesuai dengan yang dihipotesiskan, dan sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa akuntan publik dalam memberikan pelayanan jasa profesionalnya harus bertanggung jawab kepada kepentingan masyarakat luas (publik servant attitude) bukan melayani kepentingan klien saja. Akuntan publik bertanggung jawab selain kepada masyarakat, juga mempunyai tanggung jawab hukum sebagai konsekuensi profesinya. Dalam menjalankan tugas profesinya, akuntan publik tidak boleh memberikan informasi keuangan klien yang diperiksanya kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan. Menurut Holmes dan

Bers tanggung jawab etis seorang akuntan publik kepada masyarakat harus sedemikian rupa, sehingga masyarakat yang berkepentingan dengan dunia usaha tidak disesatkan dengan hasil audit laporan keuangan perusahaan.

2). **Persepsi BPR mengenai pengaruh kecakapan teknik terhadap independensi penampilan akuntan publik.**

Hasil perhitungan seperti disajikan pada tabel 4 di atas menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 3,451,  $t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5%, didapat angka 2,3044 (lampiran 5); oleh karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,451 > 2,3044$ ) atau  $P \text{ value} < 0,05$  ( $0,001 < 0,05$ ), maka hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi BPR, kecakapan teknik dalam bidang auditing dan akuntansi berpengaruh positif secara signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. Hasil perhitungan tersebut sesuai dengan yang dihipotesiskan, dan juga sesuai pendapat Rittenberg (1976) yang mengindikasikan bahwa kemampuan untuk mencapai pertimbangan yang independen sangat tergantung pada kecakapan teknik auditing dan kecakapan teknik akuntansi. Profesi akuntan publik berhubungan erat dengan kemampuan untuk bertindak sebagai ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Kecakapan teknik dalam bidang akuntansi dan audit merupakan syarat mutlak bagi akuntan publik untuk menjalankan tugas profesionalnya.

3). **Persepsi BPR mengenai pengaruh faktor ekonomi terhadap independensi akuntan publik.**

Hasil perhitungan tabel 4 diperoleh angka  $t_{hitung}$  sebesar  $-5,320$ , dan  $t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5%, didapat angka 2,3044 seperti

pada lampiran 5; oleh karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $-5,320 > 2,3044$ ) atau p value  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ), maka berdasarkan hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi BPR, faktor hubungan ekonomi dengan klien berpengaruh negatif secara signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. Hasil uji statistik ini sesuai dengan yang dihipotesiskan; dan juga sesuai dengan pernyataan dalam teori yang mengatakan bahwa akuntan publik harus bebas dari faktor hubungan usaha dengan klien yang diperiksa; jika tidak akan mengakibatkan rusaknya independensi akuntan publik. Akuntan publik yang berpartner usaha dengan suatu perusahaan atau sebagai pemegang saham, tidak boleh memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan tersebut.

**4). Persepsi BPR mengenai pengaruh hubungan sosial terhadap Independensi penampilan akuntan publik.**

Hasil perhitungan seperti pada tabel 4 diperoleh angka  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,689$  dan  $t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5% (lampiran 5), didapat angka  $2,3044$ ; oleh karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,689 < 2,3044$ ) atau p value  $> 0,05$  ( $0,494 > 0,05$ ), maka berdasarkan hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi BPR, hubungan sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. Hasil perhitungan ini tidak sesuai dengan yang dihipotesiskan dan tidak mendukung pernyataan dalam teori bahwa apabila akuntan publik menjadi anggota pengurus pada yayasan sosial, tidak dapat memeriksa yayasan tersebut karena independensinya diragukan. Sebagai pengurus ia

mempunyai tanggung jawab penuh tentang segala aspek yayasan sosial tersebut, termasuk aspek keuangan.

**5). Persepsi BPR mengenai pengaruh pemberian jasa lain selain jasa audit terhadap independensi penampilan akuntan publik.**

Hasil perhitungan seperti pada tabel 4 diperoleh angka  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,578$   $t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5%, didapat angka 2,3044. (lampiran 5); oleh karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-0,578 < 2,3044$ ) atau p value  $> 0,05$  ( $0,566 > 0,05$ ), maka berdasarkan hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi BPR, pemberian jasa lain selain jasa audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. Hasil perhitungan di atas tidak sesuai dengan yang dihipotetiskan dan tidak mendukung pernyataan dalam teori bahwa apabila akuntan publik yang memberikan jasa lain selain jasa audit laporan keuangan kepada kliennya, maka masyarakat akan meragukan independensinya.

**6). Persepsi BPR mengenai pengaruh penghasilan audit terhadap independensi penampilan akuntan publik.**

Hasil perhitungan pada tabel 4 diperoleh angka  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,583$   $t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5%, didapat angka 2,03044 (lampiran 5); Oleh karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-0,583 < 2,3044$ ) atau p value  $> 0,05$  ( $0,562 > 0,05$ ), maka berdasarkan hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi BPR, penghasilan audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap independensi penampilan akuntan

publik. Hasil uji statistik ini tidak sesuai dengan yang dihipotetiskan dan tidak mendukung pernyataan yang dikemukakan antara lain oleh Supriyono bahwa penghasilan audit yang besar dapat mengurangi independensi akuntan publik; dengan alasan bahwa kantor akuntan yang menerima penghasilan audit besar merasa tergantung pada klien, dan takut kehilangan klien tersebut. Kantor akuntan cenderung memberikan counterpart fee yang besar kepada salah satu atau beberapa pejabat kunci klien yang diaudit. Dalam menjalankan pekerjaan profesinya, meskipun akuntan dibayar oleh klien, namun harus tetap menjaga sikap independensinya; oleh karena yang memanfaatkan hasil auditnya terutama pihak lain selain kliennya.

**7). Persepsi BPR mengenai pengaruh hubungan personal terhadap independensi penampilan akuntan publik .**

Hasil perhitungan tabel 4 diperoleh angka  $t_{hitung}$  sebesar 1,272  $t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5%, didapat angka 2,3044 (Lampiran 5); oleh karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,272 < 2,3044$ ) atau p value > 0,05 ( $0,209 > 0,05$ ); maka uji statistik tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi BPR, hubungan personal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. Hasil perhitungan tersebut tidak sesuai dengan yang dihipotetiskan dan tidak mendukung pendapat yang menyatakan bahwa apabila akuntan publik mempunyai hubungan sedarah, ipar, saudara jauh dan sahabat dekat akan menimbulkan keadaan-keadaan yang mungkin merusak independensi akuntan publik.

#### 4.4.2 Pengujian Terhadap Pengaruh Variabel Independen Secara Bersama (Uji Simultan).

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah menurut persepsi BPR semua variabel independen ( $X_1$ - $X_7$ ) secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Pengujian dilakukan dengan menggunakan distribusi F dengan membandingkan antara  $F_{hitung}$  yang terdapat pada Tabel *Analysis of variance* dari hasil perhitungan dengan nilai kritis F. Untuk mengetahui tingkat signifikansinya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$F_{test} = \frac{R^2(N - (k + 1))}{(1 - R^2)(k)}$$

Diketahui :

$$R^2 = 0,611$$

$$N = 62$$

$$k = 7 \text{ (jumlah variabel bebas)}$$

$$F_{test} = \frac{0,611(62 - (7 + 1))}{(1 - 0,611)(7)}$$

$$= \frac{32,994}{2,793}$$

$$= 11,8131$$

Harga  $F_{test}$  sebesar 11,8131 tersebut kemudian dibandingkan dengan harga  $F_{tabel}$ . Pada tingkat kepercayaan 95% ( $p=0,05$ ) tenaga kerja  $N = 62$  diketahui harga  $F_{tabel}$  sebesar 2,1846 (lampiran 5). Hasil perbandingnya menunjukkan

bahwa harga  $F_{test}$  lebih besar dari harga  $F_{tabel}$  yaitu  $11,8131 > 2,1846$ . Hasil  $F_{test}$  lebih besar dari harga  $F_{tabel}$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen tanggung jawab profesional ( $X_1$ ), kecakapan teknik ( $X_2$ ), faktor ekonomi ( $X_3$ ), hubungan sosial ( $X_4$ ), pemberian jasa lain selain jasa audit ( $X_5$ ) penghasilan audit ( $X_6$ ) dan hubungan personal ( $X_7$ ) secara bersama-sama mempengaruhi variabel independensi penampilan akuntan publik ( $Y$ ).

#### 4.4.3 Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pengaruh atau persentase perubahan pada variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen secara bersama-sama. Berdasarkan hasil perhitungan komputer dengan program SPSS, diperoleh besarnya nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,611. Nilai  $R^2$  sebesar 0,611 ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tanggung jawab profesional ( $X_1$ ), kecakapan teknik ( $X_2$ ), faktor ekonomi ( $X_3$ ), hubungan sosial ( $X_4$ ), pemberian jasa lain selain jasa audit ( $X_5$ ) audit fee ( $X_6$ ) dan hubungan personal ( $X_7$ ) secara bersama-sama menyumbang sebesar 61,1% terhadap variasi variabel independensi penampilan akuntan publik ( $Y$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen ( $X$ ) secara bersama-sama terhadap variabel dependen ( $Y$ ) tergolong kuat karena melebihi 50% (Singgi Santoso, 2000: 151).

Besarnya perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} 1 - R^2 &= 1 - 0,611 \\ &= 0,399 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat perubahan independensi penampilan akuntan publik yang disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti adalah sebesar 0,399 atau 39,9%.

#### **Ketepatan prediksi**

Tepat atau tidaknya prediksi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini dapat diketahui dengan membandingkan besarnya Standar Deviasi variabel terikat ( $SD_y$ ) dengan nilai Standar Error of Estimate ( $SE_{est}$ ). Prediksi dinyatakan tepat, jika besarnya nilai  $SD_y$  lebih besar dari nilai  $SE_{est}$

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh besarnya  $SD_y$  sebesar 2,100 dan nilai  $SE_{est}$  sebesar 1,132 (Lampiran 4). Hasil perbandingan nilai  $SD_y$  lebih besar dari  $SE_{est}$  yaitu  $2,100 > 1,132$ ; oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa prediksi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah tepat karena ada pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel bebas ( $X_1$ ) s/d ( $X_7$ ) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y).

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan analisis data mengenai ketujuh faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik menurut persepsi BPR di propinsi Jawa Tengah, maka hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1). Tangung jawab profesional ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap independensi penampilan akuntan publik ( $Y$ ); yang ditunjukkan dengan hasil perhitungan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,173 > 2,3044$ ) atau p value  $< 0,05$  ( $0,002 < 0,05$ ) yang berarti bahwa: akuntan publik yang memiliki sikap tanggung jawab professional akan mempertahankan sikap independensi penampilannya.
- (2). Kecakapan teknik ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap independensi penampilan akuntan publik ( $Y$ ) ole karena hasil perhitungan menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,451 > 2,3044$ ) atau P value  $< 0,05$  ( $0,001 < 0,05$ ); yang berarti para auditor akuntan publik yang memiliki kecakapan teknik auditing dan akuntansi akan meningkatkan sikap independensi penampilannya; atau dapat dikatakan bahwa kemampuan untuk mencapai pertimbangan yang independen sangat tergantung pada kecakapan teknik auditing dan kecakapan teknik akuntansi.
- (3). Faktor hubungan ekonomi dengan klien ( $X_3$ ) berpengaruh negatif terhadap independensi penampilan akuntan publik ( $Y$ ) oleh karena hasil perhitungan diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $-5,320 > 2,3044$ ) atau p value  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ); yang berarti bahwa adanya ikatan keuangan dan hubungan usaha

dengan klien yang sedang diaudit sangat mempengaruhi akuntan publik untuk tidak mempertahankan sikap independensi penampilannya.

- (4). Hubungan sosial ( $X_4$ ) tidak berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik (Y) oleh karena hasil perhitungan menunjukkan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,689 < 2,3044$ ) atau p value  $> 0,05$  ( $0,494 > 0,05$ ); yang berarti bahwa bahwa akuntan publik yang memiliki hubungan sosial dengan klien yang diperiksanya tidak mempengaruhi akuntan publik tersebut untuk bersikap independen dalam penampilan.
- (5). Pemberian jasa lain selain jasa audit ( $X_5$ ) tidak berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik (Y). Dari hasil perhitungan diperoleh  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-0,578 < 2,3044$ ) atau p value  $> 0,05$  ( $0,566 > 0,05$ ); yang berarti bahwa akuntan publik yang memberikan jasa lain selain jasa audit kepada kliennya tidak mengakibatkan akuntan publik tetap kehilangan atau merosot sikap independensi dalam penampilannya.
- (6). Penghasilan audit atau audit fee ( $X_6$ ) tidak berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik (Y). Dari hasil perhitungan analisis diperoleh  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-0,583 < 2,3044$ ) atau p value  $> 0,05$  ( $0,562 > 0,05$ ), yang berarti bahwa besar kecilnya penghasilan audit yang diterima akuntan publik, tidak menghambat akuntan publik untuk mempertahankan sikap independensi dalam penampilannya.
- (7). Hubungan personal ( $X_7$ ) tidak berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik (Y). Dari hasil perhitungan analisis

diperoleh  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,272 < 2,3044$ ) atau  $p \text{ value} > 0,05$  ( $0,209 > 0,05$ ); yang berarti bahwa hubungan keluarga dekat atau hubungan keluarga jauh tidak menghambat akuntan publik untuk mempertahankan sikap independensi dalam penampilannya.

- (8). Berdasarkan hasil perhitungan, secara bersama-sama variabel independen: tanggung jawab profesional ( $X_1$ ), kecakapan teknik ( $X_2$ ), faktor hubungan ekonomi dengan klien ( $X_3$ ), hubungan sosial ( $X_4$ ), pemberian jasa lain selain jasa audit ( $X_5$ ), besar atau kecil penghasilan audit ( $X_6$ ), hubungan personal ( $X_7$ ) mempengaruhi variabel terikat: independensi penampilan akuntan publik ( $Y$ ), dimana  $F_{test} > F_{tabel}$  ( $11,8131 > 2,1846$ ).
- (9). Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa dari ketujuh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ( $X_1 - X_7$ ), variabel tanggung jawab profesional ( $X_1$ ), kecakapan teknik ( $X_2$ ) dan hubungan ekonomi ( $X_3$ ) secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen independensi penampilan akuntan publik ( $Y$ ). Sedangkan variabel independen hubungan sosial ( $X_4$ ), pemberian jasa lain selain jasa audit ( $X_5$ ), penghasilan audit atau audit fee ( $X_6$ ), dan hubungan personal ( $X_7$ ) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen independensi penampilan akuntan publik ( $Y$ ). Oleh karena itu dalam penelitian selanjutnya perlu dibuktikan kekuatan pengaruhnya dengan menambah sampel penelitian, menambah pertanyaan dalam kuesioner penelitian.
- (10). Dari ketujuh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, empat variabel memiliki koefisien regresi bertanda positif, yang berarti

berpengaruh positif terhadap variabel dependen (Y) yaitu  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_4$  dan  $X_7$ . Sedangkan variabel independen  $X_3$ ,  $X_5$ , dan  $X_6$  memiliki koefisien regresi bertanda negatif yang berarti berpengaruh negatif terhadap variabel dependen (Y).

- (11). Variabel-variabel independen tanggung jawab profesional ( $X_1$ ), kecakapan teknik ( $X_2$ ), faktor hubungan ekonomi dengan klien ( $X_3$ ), hubungan sosial ( $X_4$ ), pemberian jasa lain selain jasa audit ( $X_5$ ), besar atau kecil audit fee ( $X_6$ ), hubungan personal ( $X_7$ ) secara simultan mempengaruhi variabel dependen independensi penampilan akuntan publik (Y), sebesar 61,1%, dan pengaruh yang disebabkan variabel lain yang tidak diteliti sebesar 39,9%.

## 5.2. Saran

Dari kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

- (1). Berdasarkan hasil penelitian ternyata beberapa faktor yang dikemukakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap independensi penampilan akuntan publik, maka untuk mendapatkan bukti empiris yang kuat penelitian ini perlu direplikasi lagi dengan beberapa jumlah kelompok sample dan responden yang berbeda dan memperbesar jumlah sample penelitian. Dalam mereplikasi perlu direvisi atribut-atribut yang berhubungan dengan variabel-variabel yang dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik, namun masyarakat masih menduga bahwa variabel-variabel tersebut sangat berpengaruh.

- (2). Penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan pada kelompok UKM khususnya BPR dengan menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik antara lain: lamanya hubungan audit dengan klien, ukuran kantor akuntan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 1989, *Codification of Statement on Auditing Standards*, New York : American of Public Accountants.
- Anderson, R.J., *The Internal Audit*, Second Edition, Copp Clark, Pitman Ltd., Toronto, 1984.
- Arens Alvin, 1989, *Auditing : An Integrated Approach*, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliff, New Jersey.
- Armstrong, Mary Beth, and Janice I. Vincent, 1989, *Public Accounting : A Professional at a Cross Roads*, Accounting Horizon.
- Arthur, David, "Independence, Yes, But Where Do We Draw The Line?", *Accountancy*, December, 1978.
- Carey, John L., "Professional Ethics of Certified Public Accountant", dalam R.K. Mautz dan Hussein A. Sharaf *The Philosophy of Auditing*, AAA, USA, 1974.
- Carmichael, dan John J, Willingham, 1987, *Auditing Concept And Methods : A Guide to Current Auditing Theory and Practice*, Singapore : Mc Graw Hill, Inc.
- Chaplin, James P., *Dictionary of Psychology*, Dell Publishing Co., Inc., New York, 1975.
- Emory, William, C., *Business Research Method*, Richard D. Irwin, Inc., Homewood Illinois, 1980.
- Estes, Ralph, *Dictionary For Accountants*, Diterjemahkan oleh , Nugroho Widjajanto, Edisi Kedua Erlangga, Jakarta, 1988.
- Farmer, Timothy, A., Et.al., " An Investigation of The Impact of Economic and Organizational Factors on Auditor Independence", *Auditing : A Journal of Practice and Theory*, Vol.7, No.1, Fall 1987.
- Firth M., 1986, Perception of Auditor Independence an Official Ethical Guideliness "*The Accounting Review*" vol. 22 Autumn 1986.
- Ghozali,(2001). "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Goldman, A. and Benzion B. (1975), " The Auditor Frim Conflict of Interests : Its Implications for Independence, A Reply", *The Accounting Review*. (Oktober,1975).

- Hadibroto, S. 1982, *Studi Perbandingan Antara Akuntansi Amerika dan Belanda dan Pengaruhnya terhadap profesi di Indonesia*, Pt. Ikhtiar Baru-van Hoeve, Jkt.
- Hermanson, Roger H., et. al., 1987, *Auditing Theory And Practice*, Fourth Edition, Richard D. Irwin Inc., USA.
- Huffman, Karen, Mark Vernoy dan Barbara Williams, *Psychology in Action*, John Wiley & Son, Inc., Singapore, 1987.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Norma Pemeriksaan Akuntan*, Jakarta, 1992.
- Knapp, M.C., "Audits Conflict : An Empirical Study of Perceived Ability Of Auditor to Resist Management Pressure", *The Accounting Review*, April, 1985.
- Lavin, D. (1976), "Perception of the Independence of the Auditor", *The Accounting Review*. (Januari, 1976).
- Mautz, R.K. dan Hussein A. Sharaf, *The Philosophy of Auditing*, AAA, USA, 1974.
- Meiggs W.B., et al, 1982, *Principles of Auditing*, Homewood Illinois, Richard D. Irwin Inc.
- Mulyadi, *Pemeriksaan Akuntan*, Bagian Penerbitan STIE YKPN, 1990.
- Nadirsyah, 1993. *Persepsi Pemakai Informasi Akuntansi dan Masyarakat Umum terhadap Independensi Akuntan Publik*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Nunally, (1978). *Psychometric Theory*. Hightstown, NJ: Mc Graw-Hill.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE.
- Robert, Roy dan James H. Mc Neill, "Horizon For a Profession", Dikutip dari Hadori Yunus, *History of Accounting in Developing Nations; The Cases of Indonesia*, Tim Koordinasi Pengembangan Akuntansi, Jakarta, 1990.
- Sekaran, Uma. (1992), *Research Method for Business A Skill Building Approach*, 2<sup>nd</sup> Ed., John Willey & Sons, Inc. Toronto.
- Shockley, 1981, Perceptions of Auditors Independence : An Empirical Analysis, *The Accounting Review* (vol. LVI No. 4 October, 1981)
- Siegel, Gary dan Helene Ramanauskas Marconi, *Behavioral Accounting*, South-Western Publishing Co., Ohio, 1989.
- Singarimbun M. dan Sofyan E, 1989, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES.
- Sudibyo B., 1993, *Tinjauan dan Saran-saran Mengenai Buku Pemeriksaan Akuntan*, Yogyakarta : BPFE.

Supriyono, 1995, *Pemeriksaan Akuntan : Faktor-faktor yang mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik*, Suatu hasil Penelitian Empiris di Indonesia, Yogyakarta: BPFE.

Sutojo, M. *Pengembangan Pengawasan Profesi Akuntan Publik di Indonesia*, Konvensi Nasional Akuntansi I, Surabaya, 14-16 Desember 1989.